



PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGUNGKAPAN EMISI KARBON DENGAN *CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL MODERASI

TESIS

Komisi Dosen Pembimbing:

Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPA., CSRA, CA
Dr. Lilik Purwanti, M.Si., CSRS., CSRA., Ak., CA



Oleh:

Ayu Astari

176020300111049

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2020**

TESIS

PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGUNGKAPAN EMISI KARBON DENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Oleh :

AYU ASTARI
176020300111049

Dipertahankan didepan penguji
pada tanggal : 20 Juli 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Pembimbing,


Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA., CSRA., CA Dr. Lilik Purwanti, M.Si., SSRS., CSRA., CA
Ketua Anggota

Mengetahui,
a/n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
Ketua Program Magister Akuntansi




Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA., CSRA., CA
NIP. 19600124 198601 2 001

LEMBAR IDENTITAS KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI

Judul : PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP
PENGUNGKAPAN EMISI KARBON DENGAN
CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI
VARIABEL MODERASI

Nama Mahasiswa : AYU ASTARI

Program Studi : AKUNTANSI

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing 1 : Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA., CSRA, CA

Pembimbing 2 : Dr. Lilik Purwanti, M.Si., CSRS., CSRA., CA

TIM PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Prof. Gugus Irianto, MSA., Ph.D., Ak

Dosen Penguji 2 : Dr. Roekhudin, SE., M.Si., Ak

Tanggal Yudisium : 20 Juli 2020

a.n Dekan

Ketua Program Studi Magister Akuntansi



Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA., CSRA, CA
NIP. 19600124 198601 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah TESIS dengan judul:

"PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGUNGKAPAN EMISI KARBON DENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI"

Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 20 Juli 2020

Mahasiswa,



NAMA : AYU ASTARI
NIM : 176020300111049
PS : MAGISTER AKUNTANSI
PPS FEB UB

ABSTRAK

Ayu Astari: Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. **Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon Dengan *Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi.** Ketua Pembimbing: Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA., CSRA., CA. Komisi Pembimbing: Dr. Lilik Purwanti, M.Si., CSRS., CSRA., Ak., CA.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan emisi karbon, serta peran *corporate governance* sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian adalah perusahaan sektor industri dasar dan kimia, pertanian, energi, transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan metode *purposive sampling*, terdapat 12 perusahaan dengan total 60 pengamatan yang diperoleh selama tahun 2014-2018. Teknik analisis menggunakan *Moderate Regression Analysis* (MRA) dengan IBM SPSS *statistics* 23. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa manajemen laba dalam perusahaan dapat meningkatkan pengungkapan emisi karbon. Dewan komisaris dapat meningkatkan kualitas pengungkapan emisi karbon yang tidak hanya digunakan sebagai bentuk simbolik untuk menutupi tindakan manajemen laba. Dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan *audit committee meetings* tidak dapat memperlemah hubungan antara manajemen laba dengan pengungkapan emisi karbon. Dewan komisaris independen dalam perusahaan ditetapkan untuk memenuhi tuntutan regulasi, sehingga tidak menjalankan fungsi monitoring secara penuh guna meningkatkan *good corporate governance*.

Kata kunci: Manajemen laba, pengungkapan emisi karbon, dan *corporate governance*



ABSTRACT

Ayu Astari: Postgraduate of the Faculty of Economics and Business, Brawijaya University. **The Effect of Earnings Management Toward Carbon Emission Disclosures with Corporate Governance as Moderating Variable.** Chief of Advisor: Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA., CSRA., CA. Advisor: Dr. Lilik Purwanti, M.Si., CSRS., CSRA., Ak., CA.

This research aims to examine and to analyze the effect of earnings management on carbon emission disclosure, and the presence of corporate governance as the moderating variable. The research population is companies in the field of industry and chemical, agriculture, energy, transportation which are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Based on the purposive sampling method, there are 12 companies with a total of 60 observations obtained during 2014-2018. The analysis technique used is Moderate Regression Analysis (MRA) with IBM SPSS statistics 23. The results showed that earnings management can increase the disclosure of carbon emission. The board of commissioners can improve the quality of carbon emissions disclosure which is not only used as a symbolic form to cover earnings management. Independent commissioners, institutional ownership, and audit committee meetings cannot weaken the relationship between earnings management and carbon emissions disclosures. The independent board of commissioners is determine to meet the demands of the regulation, so it does not carry out a full monitoring function to improve good corporate governance.

Keywords: Earnings Management, Carbon Emission Disclosure, and Corporate Governance



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, dan hidayah Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Pengaruh Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Emisi Karbon dengan Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Tesis ini menyajikan praktik-praktik manajemen laba, pengungkapan emisi karbon serta peran dari *corporate governance* dalam suatu perusahaan. Hasil tulisan ini semoga dapat memberikan sumbangsih dalam mengurangi praktik manajemen laba sehingga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan dan mengungkapkan informasi pengelolaan emisi karbon secara lebih transparan.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti berharap adanya saran dan masukan pada tulisan ini agar dapat memberikan manfaat bagi karya selanjutnya.

Malang, Juli 2020

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR IDENTITAS KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI.....	iii
LEMBAR ORISINALITAS TESIS.....	iv
RIWAYAT HIDUP.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Motivasi Penelitian.....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Kontribusi Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Teori.....	11
2.1.1 Teori <i>Stakeholder</i>	11
2.1.2 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>).....	13
2.1.3 Manajemen Laba.....	15
2.1.4 Emisi Karbon (<i>Carbon Emission</i>).....	20
2.1.5 Pengungkapan Emisi Karbon (<i>Carbon Emission Disclosures</i>).....	23
2.1.6 Tata Kelola Perusahaan (<i>Corporate Governance</i>).....	24
2.2 Penelitian Terdahulu.....	30
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....	33
3.1 Kerangka Konseptual Penelitian.....	33
3.2 Pengembangan Hipotesis.....	35
3.2.1 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.....	36
3.2.2 Peran Moderasi Ukuran Dewan Komisaris pada Pengaruh Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.....	37
3.2.3 Peran Moderasi Dewan Komisaris Independen pada Pengaruh Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.....	38
3.2.4 Peran Moderasi Kepemilikan Institusional pada Pengaruh Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.....	40



3.2.5 Peran Moderasi <i>Audit Committee Meetings</i> pada Pengaruh Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Emisi Karbon	41
BAB IV METODE PENELITIAN.....	43
4.1 Jenis Penelitian	43
4.2 Populasi dan Sampel Penelitian	43
4.3 Jenis dan Sumber Data	44
4.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	45
4.4.1 Variabel Dependen	45
4.4.2 Variabel Independen	47
4.4.3 Variabel Moderasi	49
4.4.4 Variabel Kontrol.....	52
4.5 Metode Analisis Data	54
4.5.1 Uji Statistik Deskriptif	54
4.5.2 Uji Asumsi Klasik	55
4.5.3 Analisis Regresi Moderasi.....	56
4.5.4 Pengujian Hipotesis	58
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
5.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	59
5.2 Hasil Analisis.....	60
5.2.1 Hasil Statistik Deskriptif.....	60
5.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	64
5.2.3 Hasil Analisis Regresi	69
5.2.3.1 Hasil Analisis Regresi Tanpa Moderasi	69
5.2.3.2 Hasil Analisis Regresi Moderasi.....	70
5.3 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis	74
5.3.1 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.....	74
5.3.2 Peran Moderasi Ukuran Dewan Komisaris pada Pengaruh Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.....	76
5.3.3 Peran Moderasi Dewan Komisaris Independen pada Pengaruh Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.....	78
5.3.4 Peran Moderasi Kepemilikan Institusional pada Pengaruh Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.....	80
5.3.5 Peran Moderasi <i>Audit Committee Meetings</i> pada Pengaruh Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.....	81
5.4 Hasil Pengujian Variabel Kontrol	83
BAB VI PENUTUP	85
6.1 Kesimpulan	85
6.2 Implikasi Penelitian	86
6.3 Keterbatasan dan Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	100



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 <i>Carbon Disclosure Checklist</i>	46
Tabel 5.1 Hasil <i>Judgment Sampling</i>	59
Tabel 5.2 Hasil Statistik Deskriptif	61
Tabel 5.3 Hasil Uji Normalitas	64
Tabel 5.4 Hasil Uji Multikolinearitas	65
Tabel 5.5 Hasil Uji Autokorelasi	67
Tabel 5.6 Hasil Analisis Regresi Tanpa Moderasi	69
Tabel 5.7 Hasil Analisis Regresi Dengan Moderasi	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian	35
Gambar 5.1 Hasil Uji Heterokedastisitas Model 1	66
Gambar 5.2 Hasil Uji Heterokedastisitas Model 2	67
Gambar 5.3 Hasil Uji <i>Runs Test</i>	68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2010, Burger King memutuskan untuk menghentikan pembelian minyak kelapa sawit dari PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART). PT. Sinar Mas diduga telah melakukan perusakan hutan tropis yang membahayakan kehidupan satwa, serta mengurangi kemampuan penyerapan *carbon dioxide* (CO₂) yang merupakan salah satu penyebab utama perubahan iklim global atau lebih dikenal dengan istilah *global warming* (swa.co.id, 2010, diakses pada 26 Januari 2019).

Fenomena ini menunjukkan bahwa saat ini perusahaan tidak bisa sekedar memperhatikan aspek ekonomi saja, melainkan aspek lingkungan dan sosial penting untuk diperhatikan.

Kekhawatiran publik atas isu dan masalah yang disebabkan oleh perubahan iklim menyebabkan munculnya peraturan untuk mengurangi jumlah gas rumah kaca di suatu negara (Ghomi dan Leung, 2013).

Beberapa negara seperti Selandia Baru, Korea Selatan, Jepang, Uni Eropa, Kanada, dan Amerika Serikat telah mengeluarkan peraturan wajib bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi emisi karbon (*World Resources Institute*, 2015). Di Indonesia, pemerintah telah merilis peraturan untuk mengurangi dampak emisi karbon sejak tahun 2013, untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan serta berkontribusi dalam mengatasi pemanasan global (Faisal et al., 2018). Sebagai salah satu



penyumbang emisi gas rumah kaca, perusahaan diharapkan dapat mengurangi emisi sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang ditujukan melalui pengungkapan emisi karbon.

Pengungkapan emisi karbon dipandang sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional terhadap perubahan iklim. Perusahaan melaksanakan pengungkapan emisi karbon didasari dengan beberapa pertimbangan, diantaranya untuk mendapatkan legitimasi dari para *stakeholder*, menghindari peningkatan *operating costs*, pengurangan permintaan (*reduced demand*), risiko reputasi (*reputational risk*), proses hukum (*legal proceedings*), serta denda dan pinalti (Berthelot dan Robert, 2011). Namun, pengungkapan emisi karbon yang dilakukan perusahaan memiliki beberapa resiko diantaranya, dapat meningkatkan biaya operasi (Coburn et al., 2011), menurunkan nilai pasar (Aggarwal dan Dow, 2011), serta memberikan kesempatan kepada manajemen untuk terlibat dalam manajemen laba (Prior et al., 2008).

Manajemen laba diartikan sebagai sebuah tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan manajemen secara proporsional maupun meningkatkan nilai perusahaan dimata investor dengan mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan (Ndaparoka, 2012). Manajemen dengan wewenang menentukan kebijakan penyusunan dan penyajian laporan keuangan, berusaha mencari celah agar informasi laba yang dilaporkan terlihat baik (Tariverdi et al., 2012). Manajemen yang terbukti melakukan manajemen laba dapat kehilangan reputasi, pekerjaan dan



dalam jangka panjang, perusahaan akan kehilangan kepercayaan yang mengarah pada peningkatan kewaspadaan pemangku kepentingan (Zahra et al., 2005). Oleh karena itu, manajer memberikan kompensasi melalui praktik tanggung jawab sosial untuk mengalihkan kewaspadaan pemangku kepentingan yang akan berdampak pada reputasi perusahaan (Prior et al., 2008).

Pengungkapan tanggung jawab sosial dapat menciptakan citra positif bagi perusahaan dan meningkatkan dukungan dari berbagai kelompok pemangku kepentingan baik aktivis, media, dan masyarakat (Branco & Rodrigues, 2006). Menurut Prior et al., (2008), manajer yang melakukan manipulasi laba memiliki kemungkinan untuk menciptakan citra perusahaan yang ramah lingkungan melalui praktik tanggung jawab sosial, karena hal ini terbukti dapat meningkatkan dukungan dari pemangku kepentingan. Manajer juga tidak akan kehilangan pekerjaan akibat tekanan pemangku kepentingan yang merasa dirugikan dengan manajemen laba (Prior et al., 2008).

Hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa *good corporate governance* dapat membatasi manajemen untuk melakukan kegiatan yang menguntungkan diri sendiri (Dechow et al., 1996; Klein, 2002; Chen et al., 2007; Mansor et al., 2013). Mekanisme *corporate governance* diharapkan dapat digunakan untuk mengontrol kinerja manajemen, dan menentukan kebijakan pengungkapan emisi karbon. Hasil penelitian Choi et al., (2013) dan Elyasih et al., (2018) menunjukkan kualitas *corporate governance* yang efektif merupakan kunci pengungkapan emisi karbon, karena pihak-pihak



yang berada di dalam struktur organisasi berfungsi sebagai penentu dan pengendali pengungkapan laporan tahunan.

Mekanisme *corporate governance* yang efektif dapat dilakukan salah satunya melalui mekanisme monitoring dengan menambah persentase kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan institusi lainnya (Fransiska et al., 2016). Hasil penelitian Al-Zyoud (2012), menunjukkan bahwa investor institusional memberikan kontribusi dalam membatasi terjadinya manajemen laba. Kepemilikan institusional yang semakin besar dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen, sehingga kinerja manajemen lebih optimal dan melaksanakan pengungkapan emisi karbon yang lebih luas.

Salah satu isu penting lainnya yang berkaitan dengan mekanisme *corporate governance* adalah komite audit. Komite audit memiliki fungsi pengawasan untuk memperbaiki kualitas arus informasi antara pemilik perusahaan dan manajer (Suyono, 2018). Laporan keuangan dan laporan lingkungan mempunyai tingkat informasi yang berbeda. Komite audit dapat meminta direksi dan manajemen untuk memberikan informasi atas laporan keuangan lebih transparan dan mendorong untuk mengungkapkan informasi-informasi yang bersifat sukarela (Suyono, 2018).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Sun et al., (2010) dan Faisal et al., (2018). Hasil penelitian Sun et al., (2010), menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* sebagai variabel moderasi yang



diprosikan oleh jumlah rapat komite audit memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap *corporate environmental disclosure*. Sementara *board size* tidak terbukti berpengaruh. Selain itu, manajemen laba yang diukur dengan *discretionary accrual* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *corporate environmental disclosure*. Hasil penelitian Faisal et al., (2018) menemukan bahwa pengungkapan emisi karbon terbukti sebagai salah satu cara dalam menanggapi tekanan dari *stakeholder*. Hasil ini juga memberikan bukti mengenai teori *stakeholder* sebagai motivasi untuk melakukan pengungkapan emisi karbon.

Penelitian ini menggunakan variabel dependen pengungkapan emisi karbon (*carbon emission disclosure*) merujuk pada komitmen pemerintah dalam menurunkan emisi karbon sebesar 26 persen dengan usaha sendiri sampai dengan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Sebagai penyumbang gas CO₂, industri diharapkan dapat mengurangi dan mengungkapkan emisi karbon untuk mendukung komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Luas pengungkapan emisi karbon pada penelitian ini diukur menggunakan indeks yang dikembangkan oleh Choi et al., (2013) berdasarkan lembar permintaan informasi karbon yang dikeluarkan oleh CDP (*Carbon Disclosure Project*). Lembar permintaan informasi emisi karbon yang dikeluarkan oleh CDP dapat digunakan di berbagai negara karena memiliki standar pengungkapan sukarela yang konsisten secara global (Blanco et al., 2017).



Industri dasar dan kimia, pertanian, energi, transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 digunakan sebagai objek penelitian. Industri dasar dan kimia, pertanian, energi, transportasi merupakan empat bidang prioritas penurunan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2011 mengenai RAN-GRK (Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca) dan termasuk dalam industri *high profile* (Faisal et al., 2012). Kegiatan operasional industri *high profile* pada umumnya menghasilkan residu seperti limbah dan polusi serta memiliki jumlah tenaga kerja yang tinggi sehingga mendapat perhatian lebih dari masyarakat luas dibandingkan industri *low profile* (Ade & Sudana, 2017). Hasil penelitian Faisal et al., (2012) menunjukkan bahwa perusahaan dalam kategori industri *high profile* melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih luas untuk meningkatkan akuntabilitas dan visibilitas. Sektor pertambangan termasuk dalam industri *high profile*, namun hasil identifikasi sumber emisi tiap provinsi yang tercantum dalam RAD-GRK (Rencana Aksi Daerah) menunjukkan bahwa pertambangan tidak termasuk dalam sumber emisi utama (Laporan Dua Tahun RAN-GRK BAPPENAS). Oleh karena itu, sektor pertambangan tidak termasuk dalam sampel penelitian.

1.2 Motivasi Penelitian

Motivasi dalam penelitian ini berdasar pada beberapa hal, antara lain: **Pertama**, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010 menyebutkan bahwa setiap sektor harus menerapkan kebijakan dan program yang mendukung pembangunan berkelanjutan (RAN-GRK

BAPPENAS, 2012). Tahun 2011, pemerintah kemudian mengeluarkan Perpres No. 61/2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang menjabarkan target penurunan emisi ke dalam 5 sektor utama yaitu: pertanian, energi dan transportasi, industri serta pengelolaan limbah. Namun, Indonesia belum menerapkan peraturan yang spesifik mengenai kewajiban pengungkapan emisi karbon (Faisal et al., 2018). Oleh karena itu peneliti termotivasi untuk melengkapi penelitian sebelumnya (Faisal et al., 2018; Nasih et al., 2019) dalam memeriksa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon pada perusahaan di Indonesia.

Kedua, beberapa penelitian sebelumnya membuktikan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial terkait dengan upaya manajemen untuk meningkatkan reputasi, menanggapi tuntutan dan menghindari pengawasan pemangku kepentingan (Branco & Rodrigues, 2006; Brower & Mahajan, 2013). Perspektif oportunisme menunjukkan bahwa manajer mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial untuk menutupi perilaku oportunistik (Prior et al., 2008). Sejalan dengan perspektif oportunis, hasil penelitian (Gavana et al., 2017; Buertey et al., 2019) menunjukkan perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial cenderung terlibat dalam manajemen laba. Di sisi lain (Sun et al., 2010; Kim et al., 2012; Choi et al., 2013; Velayutham, 2014) menemukan bahwa perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial cenderung lebih konservatif dalam memutuskan pilihan kebijakan akuntansi sehingga menghasilkan informasi keuangan yang transparan. Perbedaan hasil penelitian tersebut mendorong



penulis untuk meneliti lebih lanjut apakah pengungkapan emisi karbon terkait dengan manajemen laba.

Ketiga, penelitian ini mengacu pada penelitian Sun et al., (2010) mengenai peran *corporate governance* sebagai variabel moderasi antara manajemen laba dengan bentuk pengungkapan lingkungan secara lebih khusus yaitu emisi karbon. Mekanisme *corporate governance* yang digunakan pada penelitian sebelumnya terdiri dari *board size* dan *audit committee meetings*. Hasilnya menunjukkan hanya *audit committee meetings* yang memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap *corporate environmental disclosure*. Variabel *board size* disesuaikan dengan kondisi di Indonesia yang menerapkan sistem dua tingkat (*two tier board system*), dengan memisahkan fungsi direksi dan fungsi pengawasan (dewan komisaris). Selain itu, kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen ditambahkan untuk memperkuat hasil penelitian ini.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
2. Apakah manajemen laba yang dimoderasi oleh *corporate governance* (dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, *audit committee meetings*) berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?



1.4 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan emisi karbon.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh manajemen laba yang dimoderasi oleh *corporate governance* (dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, *audit committee meetings*) terhadap pengungkapan emisi karbon.

1.5 Kontribusi Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka kontribusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bukti empiris mengenai teori *stakeholder* dan teori agensi. Selain itu, penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi untuk menambah referensi dalam perkembangan penelitian di bidang akuntansi lingkungan khususnya emisi karbon. Hubungan antara manajemen laba dan pengungkapan emisi karbon dengan mekanisme *corporate governance* sebagai variabel moderasi masih jarang untuk diteliti, sehingga perlu diadakannya penelitian secara lebih mendalam khususnya di sektor yang



menghasilkan emisi karbon tinggi seperti pertanian, industri dasar dan kimia, serta energi dan transportasi.

2. Kontribusi Praktek

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian perusahaan untuk menerapkan *corporate governance* yang baik, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengungkapan serta mengurangi praktik manajemen laba. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan informasi kepada investor mengenai kemungkinan praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

3. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam membuat regulasi untuk dapat menentukan kebijakan terkait dengan *corporate governance* agar dapat mengurangi praktik manajemen laba. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan menentukan kebijakan terkait penetapan pengelolaan emisi karbon untuk menanggapi masalah perubahan iklim.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori *Stakeholder*

Stanford Research Institute (SRI) pertama kali memperkenalkan istilah *stakeholder* pada tahun 1963 (Freeman, 2010). *Stakeholder* didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, ataupun mempengaruhi (Freeman, 2010). Menurut teori *stakeholder*, perusahaan bukan sebuah entitas yang beroperasi hanya untuk kepentingannya sendiri. Perusahaan harus memberikan manfaat bagi *stakeholder* (pemerintah, kreditor, masyarakat, pemegang saham, supplier, konsumen, dan pihak lain), karena keberadaan perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan *stakeholder* (Ghozali & Chariri, 2007).

Menurut Donaldson dan Preston (1995), teori *stakeholder* dapat dikategorikan ke dalam tiga sudut pandang yang berbeda yaitu deskriptif, instrumental, dan normatif. Teori *stakeholder* deskriptif menggambarkan bahwa perusahaan memiliki pemangku kepentingan, sehingga manajer diharapkan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik dengan menjalankan kepentingan perusahaan saja. Teori *stakeholder* instrumental menunjukkan bahwa perusahaan yang memperhatikan pemangku kepentingan akan memiliki strategi dan kinerja yang lebih baik. Sementara itu, teori *stakeholder* normatif menunjukkan bahwa pemangku kepentingan atau manajer harus memperhatikan beberapa prinsip etika dalam pengambilan keputusan.



Teori *stakeholder* menjelaskan bagaimana manajemen memenuhi harapan para pemangku kepentingan (Freeman et al., 2010). Menurut teori *stakeholder*, perusahaan yang akan menerapkan tanggung jawab sosial, perlu memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan yang lebih luas (Velayutham, 2014). Tekanan *stakeholder* dapat mempengaruhi sikap manajer dalam mengendalikan masalah sosial dan lingkungan, dibandingkan regulasi atau aturan pengungkapan wajib (Wood dan Ross, 2006). Namun, *stakeholder* memiliki tuntutan yang berbeda-beda terhadap perusahaan. Neu et al., (1998) menemukan bahwa beberapa perusahaan lebih responsif terhadap tuntutan yang berasal dari kelompok pemangku kepentingan yang berkaitan dengan keuangan, dibandingkan dengan kelompok lain seperti pemerhati lingkungan. Manajemen dalam hal ini, bertanggung jawab untuk menyeimbangkan tekanan yang saling bertentangan dari berbagai *stakeholder* (Brower dan Mahajan, 2013).

Pada tahun 1992, teori *stakeholder* mulai digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian yang berkaitan dengan pelaporan lingkungan dan keberlanjutan (Parmar et al., 2010). Roberts (1992), menggunakan teori *stakeholder* untuk memprediksi tingkat pengungkapan kinerja sosial perusahaan. Secara khusus, Roberts (1992) menemukan bahwa kekuatan *stakeholder*, *strategic posture*, dan kinerja keuangan terkait dengan tingkat pengungkapan. Semakin kuat dorongan dari para *stakeholder*, maka akan semakin besar upaya perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan (Parmar et al., 2010). Teori *stakeholder* dapat diuji dengan melakukan analisis konten pada laporan tahunan perusahaan sebagai alat komunikasi



yang paling efisien bagi perusahaan dengan para pemangku kepentingan (Gray et al., 1995).

2.1.2 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi (*agency theory*) adalah teori yang menjelaskan keterkaitan antara prinsipal dengan agen atau disebut dengan hubungan keagenan. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara satu orang atau lebih (yang dikenal dengan prinsipal), dengan orang lain (yang dikenal sebagai agen), untuk melakukan suatu jasa dan membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Prinsipal adalah pemegang saham atau investor. Sedangkan agen, adalah manajemen atau pihak yang mengelola perusahaan.

Teori agensi menurut Eisenhardt (1989) dilandasi oleh tiga asumsi. Pertama, asumsi tentang sifat dasar manusia yang menekankan bahwa pada dasarnya mementingkan diri sendiri (*self-interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai atau cenderung menghindari resiko. Kedua, asumsi tentang ke-organisasian, yaitu adanya konflik antar anggota organisasi, efisien sebagai kriteria produktivitas dan adanya *asymmetric information* antara prinsipal dan agen. Ketiga, asumsi tentang informasi yang dipandang sebagai barang komoditi untuk diperjualbelikan.

Adam Smith (1937) dalam karyanya *The Wealth of Nations*, menyebutkan bahwa suatu organisasi apabila dikelola oleh seseorang atau sekelompok orang yang bukan pemilik, maka terdapat kemungkinan bahwa orang atau kelompok tersebut tidak akan bekerja demi keuntungan pemilik



(Panda dan Leepsa, 2017). Jensen dan Meckling (1976), mendefinisikan perusahaan sebagai “*set of contracts between the factors of production*” yaitu terdapat hubungan kontrak antara pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara prinsipal dan agen yang bekerja untuk memenuhi kepentingan diri sendiri dan mengarah pada konflik keagenan (Panda dan Leepsa, 2017).

Konflik keagenan muncul ketika Jensen dan Meckling (1976) memperkenalkan teori mengenai pemisahan kepemilikan dan pengendalian dalam perusahaan. Agen secara keseluruhan lebih mengetahui kualitas perusahaan dibandingkan dengan prinsipal karena agen menjalankan kegiatan bisnis perusahaan secara langsung. Ketika agen memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan, namun tidak diberikan sepenuhnya kepada prinsipal maka terjadi ketidakseimbangan informasi atau disebut dengan asimetri informasi (*information asymmetry*). Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan agen, yaitu mendapatkan kompensasi manajemen sesuai dengan kontrak yang telah disepakati antara agen dan prinsipal.

Hubungan keagenan menimbulkan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat tidak selarasnya minat antara agen dan prinsipal, karena manajer tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik (Messier et al., 2008). Biaya agensi (*agency cost*) kemudian timbul untuk mengurangi masalah keagenan. Jensen dan Meckling (1976), membagi biaya keagenan menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk



melakukan pemantauan dan penilaian kinerja agen. *Bonding cost* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk mematuhi mekanisme dan menjamin bahwa agen akan bekerja sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan. Sementara itu, *residual loss* merupakan kerugian yang diterima prinsipal, akibat pengambilan keputusan manajer yang tidak efisien atau tidak selaras dalam memaksimalkan kekayaan pemilik.

Teori agensi membantu dalam menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan untuk mengendalikan tindakan agen, dan mengurangi konflik keagenan (Panda dan Leepsa, 2017). Hasil penelitian menemukan bahwa struktur kepemilikan dan struktur tata kelola perusahaan dapat mengurangi biaya agensi (Panda dan Leepsa, 2017).

2.1.3 Manajemen Laba

Menurut Scott (2015: 445), manajemen laba adalah pilihan kebijakan akuntansi yang dipilih oleh manajer atau tindakan nyata yang dapat mempengaruhi laba, sehingga mencapai suatu tujuan pelaporan laba tertentu. Scott (2015: 444-445) kemudian membagi manajemen laba ke dalam dua perspektif yang berbeda, yaitu perspektif pelaporan keuangan dan perspektif kontrak. Menurut perspektif pelaporan keuangan, manajemen laba dapat digunakan untuk menghindari laporan kerugian, atau memenuhi perkiraan laba dari analis. Manajemen memiliki tujuan untuk menghindari penurunan reputasi dan reaksi negatif harga saham seiring adanya kegagalan dalam memenuhi ekspektasi investor. Selain itu, menurut perspektif pelaporan keuangan, manajemen laba dapat digunakan



sebagai sarana untuk mengkomunikasikan informasi dalam manajemen kepada investor.

Manajemen laba berdasarkan perspektif kontrak, dapat digunakan sebagai cara untuk melindungi perusahaan dari berbagai kejadian yang tidak terduga ketika kontrak bersifat kaku dan tidak lengkap. Manajer dapat memilih kebijakan akuntansi yang mendukung untuk mencapai tujuan tertentu dalam batasan yang telah ditentukan oleh *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP). GAAP tidak membatasi manajer dalam memilih kebijakan dan prosedur akuntansi (Scott, 2015: 445). GAAP yang bersifat fleksibel, memungkinkan manajemen menggunakan kebijakan ini untuk melaporkan laba yang sebenarnya tidak mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara akurat (Prior et al., 2008).

Salah satu motivasi manajemen laba yang dilakukan oleh manajer mengacu pada penelitian Healy (1985) dalam Scott (2015) yaitu untuk memaksimalkan bonus dari rencana kompensasi perusahaan. Manajer akan memperoleh bonus ketika laba yang dilaporkan berada dalam batas bawah (*bogey*) dan batas atas (*cap*) yang ditentukan perusahaan. Oleh karena itu, manajer yang oportunis akan meningkatkan angka laba yang dilaporkan untuk dapat memaksimalkan bonus yang diperoleh.

Motivasi manajemen laba selain tujuan bonus adalah motivasi kontrak lainnya (*other contracting motivations*) (Scott, 2015: 454). Kontrak jangka panjang antara pemberi pinjaman dan manajer pada umumnya mencakup perjanjian yang melindungi pemberi pinjaman dari tindakan manajer yang bertentangan seperti kelebihan pembagian dividen kepada



pemegang saham, mengerjakan proyek-proyek beresiko tinggi, atau melakukan tambahan pinjaman. Apabila manajer terbukti melakukan pelanggaran tersebut, maka hal ini akan menimbulkan biaya yang sangat besar. Manajemen laba dipandang sebagai alat yang dapat digunakan manajer untuk menghindari kemungkinan pelanggaran yang dapat terjadi dalam perjanjian hutang. Hasil penelitian Sweeney (1994) dalam Scott (2015), menemukan bahwa batasan (*covenant*) kredit terkait dengan laba, sehingga perusahaan cenderung untuk mengadopsi standar akuntansi yang dapat meningkatkan laba bersih yang dilaporkan.

Manajemen laba juga didorong oleh faktor lainnya, seperti mencapai ekspektasi laba investor (*to meet investors earning expectations*) (Scott, 2015: 455). Ekspektasi laba investor dapat dibentuk dalam beberapa cara, seperti pendapatan yang sama untuk periode saat ini dengan sebelumnya atau perkiraan laba analisis. Perusahaan yang melaporkan laba lebih tinggi daripada ekspektasi biasanya akan mengalami kenaikan harga saham karena investor memandang perusahaan akan memiliki kinerja masa depan yang baik. Sebaliknya, apabila perusahaan mengalami kerugian maka harga saham akan mengalami penurunan yang signifikan. Secara tidak langsung, hal ini juga akan mempengaruhi reputasi manajemen apabila manajer tidak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal. Oleh karena itu, memenuhi ekspektasi laba investor dan mempertahankan reputasi adalah dorongan yang kuat bagi manajer untuk melakukan manajemen laba.

Motivasi manajemen laba lainnya adalah penawaran saham (*stock offerings*) (Scott, 2015: 457). Ketika sebuah perusahaan akan menerbitkan saham baru atau tambahan ke publik, manajemen menghadapi dorongan yang kuat untuk mengelola laba ke atas sehingga memperoleh pendapatan yang maksimal dari saham tersebut. Informasi laba bersih yang diterbitkan pada saat penawaran saham perdana dapat meningkatkan nilai perusahaan dimata investor.

Praktik manajemen laba tidak sepenuhnya dianggap sebagai hal yang buruk. Beneish (2001), membagi manajemen laba ke dalam dua perspektif, yaitu oportunistik dan informatif. Manajemen laba dalam perspektif oportunistik berusaha untuk memberikan informasi yang dapat menyesatkan investor namun melindungi kinerja, reputasi dan kompensasi manajer dalam perusahaan. Menurut perspektif informatif, manajemen laba bertujuan untuk memberikan informasi yang bersifat pribadi kepada investor mengenai masa depan perusahaan. Young (2015), menemukan bahwa manajemen cenderung bertindak dalam perspektif oportunistik.

Metode akrual merupakan model paling umum yang digunakan untuk mendeteksi manajemen laba. Metode akrual tidak berpengaruh pada arus kas perusahaan. Akrual merupakan selisih antara laba dengan arus kas operasi perusahaan. Akrual dibagi menjadi dua kategori yaitu akrual diskresioner dan akrual non-diskresioner. Komponen akrual diskresioner terbentuk dari transaksi atau pengelolaan nilai laba yang dilakukan oleh manajemen (Sebayang & Veronica, 2014). Sementara komponen akrual

non-diskresioner terbentuk akibat transaksi yang sifatnya normal dalam tingkatan kinerja, kondisi ekonomi dan strategi bisnis yang digunakan.

Stubben (2010), mengembangkan model pendapatan dan akrual pada tingkat kuartal karena dianggap lebih baik. Pendapatan per kuartal dianggap lebih mudah dalam mengontrol terjadinya manipulasi karena menggambarkan ukuran yang objektif dari kegiatan operasi perusahaan. Terdapat dua formula dalam model ini, yaitu *revenue model* dan *conditional revenue model*. *Revenue model* lebih menitikberatkan pada hubungan secara langsung antara pendapatan dengan piutang. Apabila pendapatan per kuartal mampu menjelaskan piutang dengan baik, maka tidak terindikasi adanya manajemen laba. Persamaan *revenue model* adalah sebagai berikut:

$$\Delta AR_{it} = \alpha + \beta_1 \Delta R1_3_{it} + \beta_2 \Delta R4_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

ΔAR_{it} = Piutang akrual

$R1_3$ = Pendapatan tiga kuartal pertama

$R4$ = Pendapatan kuartal keempat

ε = error

Conditional revenue model, memiliki penambahan aspek yang mempengaruhi pendapatan diskresioner, diantaranya ukuran perusahaan (*size*), umur perusahaan (*age*) dan margin kotor (*GRM*). Persamaan *conditional revenue model* adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \Delta AR_{it} = & \alpha + \beta_1 \Delta R_{it} + \beta_2 \Delta R_{it} \times SIZE_{it} + \beta_3 \Delta R_{it} \times AGE_{it} + \beta_4 \Delta R_{it} \times AGE_SQ_{it} \\ & + \beta_5 \Delta R_{it} \times GRR_P_{it} + \beta_6 \Delta R_{it} \times GRR_N_{it} + \beta_7 \Delta R_{it} \times GRM_{it} + \beta_8 \Delta R_{it} \\ & \times GRM_SQ_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

Keterangan:

AR_{it} = Piutang perusahaan i periode t

R_{it} = Perubahan pendapatan perusahaan i periode t

SIZE = Natural log dari total aset akhir tahun

AGE = Natural log dari umur perusahaan (tahun)

GRM = Margin kotor yang disesuaikan pada akhir tahun fiskal

SQ = Kuadrat dari variabel

GRR_P = Pertumbuhan pendapatan yang disesuaikan (= 0 apabila negatif)

GRR_N = Pertumbuhan pendapatan yang disesuaikan (= 0 apabila positif)

Δ = *Annual change*

Penelitian ini menggunakan *conditional revenue model* yang diperkenalkan oleh Stubben (2010) sebagai proksi manajemen laba. Model ini digunakan sebagai jawaban atas ketidakpuasan terhadap model akrual.

Hasil penelitian Sebayang & Veronica (2014) dan Mardiana (2017) menunjukkan bahwa *conditional revenue model* memiliki lebih banyak keunggulan berdasarkan uji statistik dibandingkan dengan *modified jones model* milik Dechow (1995) dan *performance matched discretionary accruals* Kothari (2015) dalam mengukur manajemen laba. *Conditional revenue model* terbukti lebih efektif dalam mendeteksi adanya manajemen laba dibandingkan dengan model akrual (Mardiana, 2017).

2.1.4 Emisi Karbon (*Carbon Emission*)

Emisi karbon didefinisikan sebagai pelepasan gas-gas yang mengandung karbon ke lapisan atmosfer bumi (Kelvin et al., 2017). Emisi gas rumah kaca disebut sebagai emisi karbon karena jumlah emisi gas rumah kaca seringkali dihitung berdasarkan jumlah *carbon dioxide* (CO₂).



Gas CO₂ bersifat seperti efek rumah kaca yaitu memantulkan radiasi dari bumi kembali ke bumi. Gas rumah kaca dibedakan menjadi dua berdasarkan sumbernya, yaitu gas rumah kaca alami dan gas rumah kaca industri. Gas rumah kaca alami menguntungkan bagi makhluk hidup karena menjaga temperatur bumi agar tetap hangat dalam kisaran 6°C. Sedangkan gas rumah kaca industri, berasal dari kegiatan industri yang dilakukan oleh manusia.

Kegiatan industrial membuat kadar *carbon dioxide* (CO₂) menjadi lebih padat sehingga alam tidak dapat menyerap seluruhnya. Kadar CO₂ yang terlalu banyak akan menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti mencairnya gunung es di kutub utara dan kutub selatan, serta tenggelamnya pulau-pulau kecil karena permukaan air laut semakin tinggi. CO₂ bersumber dari pembakaran bahan bakar, biomassa, pembusukan sampah organik, letusan gunung berapi, kebakaran hutan, pengeringan lahan gambut, produksi amonia, semen, etanol, hydrogen, besi baja, serta dari sektor pertanian.

Konsentrasi *carbon dioxide* (CO₂) pada lapisan atmosfer bumi telah meningkat sejak dimulainya revolusi industri, karena aktivitas manusia mulai berkembang pesat. *Carbon dioxide* (CO₂) merupakan bagian dari gas rumah kaca yang harus direduksi oleh negara anggota menurut amandemen Protokol Kyoto (*United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), 1998). Protokol Kyoto ditetapkan pada 12 Desember 1997 sebagai pendekatan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-



Bangsa tentang perubahan iklim mengatur penurunan emisi gas rumah kaca untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer serta mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan bagi iklim bumi.

Negara industri menghasilkan emisi karbon yang terakumulasi di atmosfer dalam jumlah yang besar, sehingga wajib untuk menurunkan emisi karbon dan mengatasi dampak perubahan iklim. Sementara negara berkembang tidak memiliki kewajiban untuk menurunkan emisi karbon, namun berhak mendapatkan bantuan dari negara industri dalam rangka berpartisipasi secara sukarela untuk menurunkan emisi karbon dan mengatasi dampak perubahan iklim (UU No. 17 Tahun 2004). Protokol Kyoto memiliki 6 target penurunan emisi gas rumah kaca yaitu *Carbon dioxide* (CO₂), *Methane* (CH₄), *Nitrous oxide* (N₂O), *Hydrofluorocarbons* (HFCs), *Perfluorocarbons* (PFCs), dan *Sulfur hexafluoride* (SF₆).

Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto dan pengesahannya melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004. Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak berkewajiban untuk menurunkan emisinya, namun keikutsertaannya sangat diperlukan untuk mencapai tujuan Protokol Kyoto. Penandatanganan Protokol Kyoto bagi Indonesia merupakan suatu upaya melancarkan pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan nasional yang berwawasan lingkungan. Indonesia dan negara-negara di dunia secara bersamaan, berkomitmen untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2°C dan mendorong upaya untuk membatasi kenaikan suhu bumi lebih jauh ke 1,5°C di atas tingkat pra industri (Laporan Inventarisasi GRK, 2017).

2.1.5 Pengungkapan Emisi Karbon (*Carbon Emission Disclosures*)

Pengungkapan dan pelaporan informasi emisi karbon di Indonesia mulai berkembang setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) serta Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (Nainggolan, 2015). Inventarisasi gas rumah kaca (GRK) ditujukan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perolehan, pemutakhiran data dan informasi emisi GRK secara periodik dari berbagai sumber emisi (*source*), serapan (*sink*), dan simpanan (*stock*) (Laporan Inventarisasi GRK, 2017).

Perusahaan akan melakukan pengungkapan informasi emisi karbon setiap satu tahun dalam laporan keberlanjutan untuk tujuan menanggapi tekanan dari berbagai pemangku kepentingan (Depoers et al., 2014). Praktik pengungkapan emisi karbon juga dapat dipandang sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan terhadap perubahan iklim.

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dikelompokkan menjadi dua yaitu, pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib adalah pengungkapan informasi yang diatur oleh badan pembuat standar dan regulator lainnya, aturan ini berupa persyaratan minimal pengungkapan yang harus dipenuhi oleh perusahaan publik (Nainggolan, 2015). Sementara pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang



diberikan secara sukarela di luar pengungkapan wajib, seperti laporan keberlanjutan. Pengungkapan emisi karbon di Indonesia termasuk dalam pengungkapan sukarela, sehingga luas pengungkapan antar perusahaan bervariasi dan beragam. Perusahaan memiliki keleluasaan dalam menentukan informasi apa saja yang dianggap relevan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pemakai.

Carbon Disclosure Project (CDP) merupakan salah satu saluran untuk pengungkapan lingkungan perusahaan secara sukarela. CDP didirikan pada tahun 2000 di Inggris sebagai organisasi nirlaba yang bertujuan untuk menjalankan suatu sistem standar pengungkapan bagi investor, perusahaan, kota dan negara dalam mengelola dampak lingkungan. CDP mendorong perusahaan mengungkapkan informasi mengenai risiko, strategi dan tindakan terhadap perubahan iklim secara lebih luas (Blanco et al., 2017). Lembar permintaan informasi emisi karbon yang dikeluarkan oleh CDP dapat digunakan di berbagai negara karena memiliki standar pengungkapan sukarela yang konsisten secara global (Blanco et al., 2017). Selain itu, emisi karbon memiliki dampak yang hampir serupa di bagian negara mana saja sehingga memungkinkan untuk menerapkan mekanisme perhitungan yang serupa.

2.1.6 Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Konsep tata kelola perusahaan (*corporate governance*) mulai menjadi bahan kajian seiring dengan adanya pemisahan antara kepemilikan (*ownership*) dan pengendalian (*control*) manajemen sejak tahun 1930 (Khan, 2011). Manajemen memiliki kepentingan yang berbeda



dengan pemegang saham. Pemegang saham mendapatkan keuntungan secara langsung tanpa harus bertanggung jawab atas kegiatan operasional perusahaan (Rahadian, 2009). Para pemegang saham akan menunjuk dewan komisaris yang memiliki kewajiban hukum dalam mewakili dan melindungi kepentingan pemilik. Sementara manajemen, adalah para tenaga profesional yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan tanpa harus bertanggung jawab menyediakan dana korporasi secara pribadi (Rahadian, 2009). Perbedaan kepentingan ini kemudian menimbulkan pertanyaan apakah dewan komisaris atau dewan direksi benar-benar bertindak sesuai dengan kepentingan para pemegang saham. Oleh karena itu, sistem *check and balances* diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan (Rahadian, 2009).

Corporate governance didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemangku kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, dengan kata lain sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (*Cadbury Committee* dalam FCGI 2001). Pendapat lain menyebutkan *corporate governance* sebagai serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (IICG, 2015).

Corporate governance tidak hanya diartikan sebagai pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan (*compliance*) dan kesesuaian dengan

praktik terbaik (*conformance*), tetapi juga harus menunjukkan kinerja (*performance*) dan menciptakan nilai (*value creation*) (IICG, 2015).

Mekanisme *corporate governance* dapat dibedakan menjadi internal dan eksternal. Mekanisme internal merupakan sebuah cara untuk mengendalikan perusahaan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, dewan komisaris dan jumlah rapat antar dewan direksi (Muryati & Suardikha, 2014). Sementara mekanisme eksternal mengendalikan perusahaan diluar mekanisme internal seperti kualitas audit, peraturan pemerintah (perlindungan investor), *monitoring debtholder*, dan kepemilikan institusional (Muryati & Suardikha, 2014).

Corporate governance bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder*, menjelaskan, serta meningkatkan peran dewan direksi, dewan komisaris, manajemen, dan para pemegang saham (FCGI, 2001). Selain menciptakan nilai tambah, mekanisme *corporate governance* yang baik diharapkan dapat mengurangi kegiatan manipulasi yang dapat dilakukan dalam perusahaan. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001), ada beberapa manfaat penerapan *corporate governance*, diantaranya:

1. Menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.



2. Mendapatkan pembiayaan yang lebih murah dan tidak *rigid* (karena faktor kepercayaan) untuk meningkatkan nilai perusahaan.
 3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanam modal di Indonesia.
 4. Meningkatkan kepuasan pemegang saham atas kinerja perusahaan sehingga meningkatkan nilai saham dan dividen.
- Membantu penerimaan APBN dari hasil privatisasi pada perusahaan BUMN.

Menyadari pentingnya penerapan *corporate governance* bagi sebuah perusahaan, maka perlu memahami terlebih dahulu prinsip-prinsip *good corporate governance*. Prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengelaborasi *best practices* untuk meningkatkan nilai dan keberlangsungan perusahaan (Rahadian, 2009). Bagi pemerintah, prinsip-prinsip ini juga dapat digunakan untuk membangun kerangka kerja penerapan *corporate governance*. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001), prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. *Fairness* (Keadilan)

Prinsip keadilan (*fairness*) memberikan perlakuan yang sama dalam keterbukaan informasi kepada para pemegang saham, baik minoritas maupun asing dari kecurangan dan *insider trading*.

Prinsip ini diwujudkan dengan membuat kebijakan perilaku perusahaan yang melindungi kepentingan minoritas, *self-dealing*, dan konflik kepentingan. Menetapkan peran dan tanggung jawab



dewan komisaris dan direksi, menyajikan informasi secara wajar, dan mengedepankan *equal job opportunity*.

2. *Disclosure* dan *Transparency* (Pengungkapan dan Transparansi)

Transparansi adalah mengungkapkan informasi perusahaan kepada para pemegang saham dengan akurat, tepat waktu dan transparan atas hal-hal penting bagi kinerja perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus bersifat material dan relevan yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi tidak hanya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan saja. Para pemegang saham dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan yang mendasar, dan memperoleh bagian atas keuntungan. Prinsip ini diwujudkan dengan mengembangkan sistem akuntansi berbasis standar untuk menjamin adanya laporan keuangan yang berkualitas. Sistem akuntansi berbasis standar juga bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen dalam mencapai pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris dan dewan direksi.

3. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas merupakan prasyarat mencapai kinerja yang berkelanjutan. Prinsip akuntabilitas menekankan pentingnya tanggung jawab manajemen kepada perusahaan dan *shareholder* melalui pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara manajer, pemegang saham,



dewan komisaris, dan auditor. Sistem pengawasan ini meliputi *monitoring*, evaluasi, dan pengendalian untuk memastikan manajemen bertindak sesuai kepentingan *shareholder* dan pihak-pihak lainnya. Prinsip ini diwujudkan dengan mengembangkan komite audit untuk mendukung sistem pengawasan oleh dewan komisaris.

4. *Responsibility* (Responsibilitas)

Sebagai anggota masyarakat, perusahaan harus taat hukum dan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar lingkungan operasional. Prinsip ini dapat diwujudkan dengan menyadari bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi dari adanya wewenang. Menyadari tanggung jawab sosial perusahaan, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, professional, dan menjunjung tinggi etika dalam menjaga lingkungan bisnis yang sehat.

5. *Independency* (Independen)

Prinsip independen diperlukan untuk menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat terjadi antara pemegang saham minoritas. Keputusan dan proses yang terjadi dalam perusahaan harus bersifat objektif dan tidak dipengaruhi kekuatan pihak-pihak tertentu.



2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai pengungkapan emisi karbon telah dilakukan oleh beberapa peneliti baik dari dalam maupun luar negeri. Penelitian tersebut meneliti faktor-faktor yang memiliki hubungan dengan praktik pengungkapan emisi karbon dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan perusahaan.

Penelitian Sun et al., (2010) menemukan bahwa manajemen laba tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan *corporate environmental disclosure* di 245 perusahaan yang terdaftar dalam *London Stock Exchange*. Mekanisme *corporate governance* yang diproksikan oleh *audit committee meetings* terbukti memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap *corporate environmental disclosure*. *Board size* tidak terbukti berperan dalam memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap *corporate environmental disclosure*. Namun, ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berhubungan positif dengan *corporate environmental disclosure*. Perusahaan besar cenderung menghadapi tekanan dari pihak eksternal yang lebih tinggi, sehingga mereka melakukan lebih banyak kegiatan tanggung jawab sosial.

Proporsi kepemilikan institusional semakin meningkat di perusahaan-perusahaan India. Hasil penelitian Ajay & Madhumathi (2015), menunjukkan proporsi kepemilikan institusional yang besar berpengaruh dalam mengurangi tindakan manajer yang oportunistik. Investor institusional terbukti secara aktif melakukan pengawasan terhadap pilihan metode akuntansi yang dilakukan oleh manajer. Ukuran perusahaan juga

berpengaruh terhadap manajemen laba. Perusahaan yang lebih besar memiliki kualitas laba yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pada saat yang sama, mempertimbangkan biaya reputasi dan terlibat dalam manajemen laba dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Selain kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Busirin et al., (2015), menemukan bahwa jumlah dewan komisaris independen yang semakin besar, dapat mengurangi manipulasi laba seiring dengan adanya mekanisme pemantauan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia.

Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Pradnyani & Sisdyani (2015), menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Perusahaan dengan ukuran dewan komisaris yang besar cenderung mengungkapkan tanggung jawab sosial secara lebih luas. Di sisi lain, Aprilliani (2017), menemukan ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Ukuran dewan komisaris yang semakin besar dapat memberikan tingkat pengawasan terhadap manajemen laba secara optimal.

Kepemilikan institusional disisi lain berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Hasil penelitian Akbas & Canikli (2018), menunjukkan ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon pada 84 perusahaan Turki yang terdaftar dalam survey *Carbon Disclosure Project*.



Perusahaan besar dan perusahaan dengan tingkat kepemilikan saham institusional yang tinggi cenderung terlibat dalam survey emisi karbon yang dilakukan oleh *Carbon Disclosure Project*. Profitabilitas juga berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi ingin menunjukkan bahwa kegiatan perusahaan tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Namun, *leverage* tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Mekanisme *corporate governance* lainnya yang terkait dengan pengungkapan emisi karbon adalah dewan komisaris independen. Kilic & Kuzey (2018), menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Istanbul tahun 2011-2015. Perusahaan Istanbul dengan jumlah dewan komisaris independen yang lebih tinggi cenderung terlibat dalam survey emisi karbon yang dilakukan oleh *Carbon Disclosure Project*. Hal ini menunjukkan perusahaan mengalami peningkatan dalam akuntabilitas dan transparansi pelaporan.

Penelitian Faisal et al., (2018), menunjukkan profitabilitas, *firm size*, tipe industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 – 2014. Industri yang bersifat sensitif terhadap lingkungan mengungkapkan emisi karbon untuk meningkatkan akuntabilitas dan visibilitas. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang rendah cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi emisi karbon.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Pengungkapan emisi karbon merupakan alat bagi perusahaan dalam mengkomunikasikan informasi tentang dampak kinerja perusahaan dalam aspek sosial dan lingkungan kepada para pemangku kepentingan.

Teori *stakeholder* menjelaskan semakin besar dorongan para pemangku kepentingan, maka perusahaan akan melakukan upaya maksimal untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ketika manajer berusaha untuk memenuhi permintaan para pemangku kepentingan, maka asimetri informasi pada saat itu semakin tinggi (Grougiou et al., 2014). Asimetri informasi memberikan kesempatan kepada manajemen untuk terlibat dalam manajemen laba.

Manajemen laba diartikan sebagai sebuah tindakan untuk mempengaruhi proses pelaporan dalam mengubah gambaran kinerja ekonomi perusahaan dalam laporan keuangan yang dipublikasikan (Prior et al., 2008). Pemegang saham yang hanya menilai kinerja perusahaan berdasarkan angka akuntansi semakin mendorong manajemen untuk memanipulasi hasil keuangan. Hal ini dilakukan untuk membuat laporan keuangan lebih representatif dalam menggambarkan kinerja perusahaan saat ini dan masa depan. Tindakan manipulasi ini tentunya tidak diharapkan dalam proses pelaporan keuangan, sehingga perusahaan membutuhkan suatu mekanisme *corporate governance* yang baik. Peneliti kemudian ingin



mengetahui peran *corporate governance* dalam mempengaruhi hubungan antara manajemen laba dengan pengungkapan emisi karbon.

Teori agensi menawarkan kerangka kerja yang menghubungkan pengungkapan emisi karbon dengan mekanisme *corporate governance*.

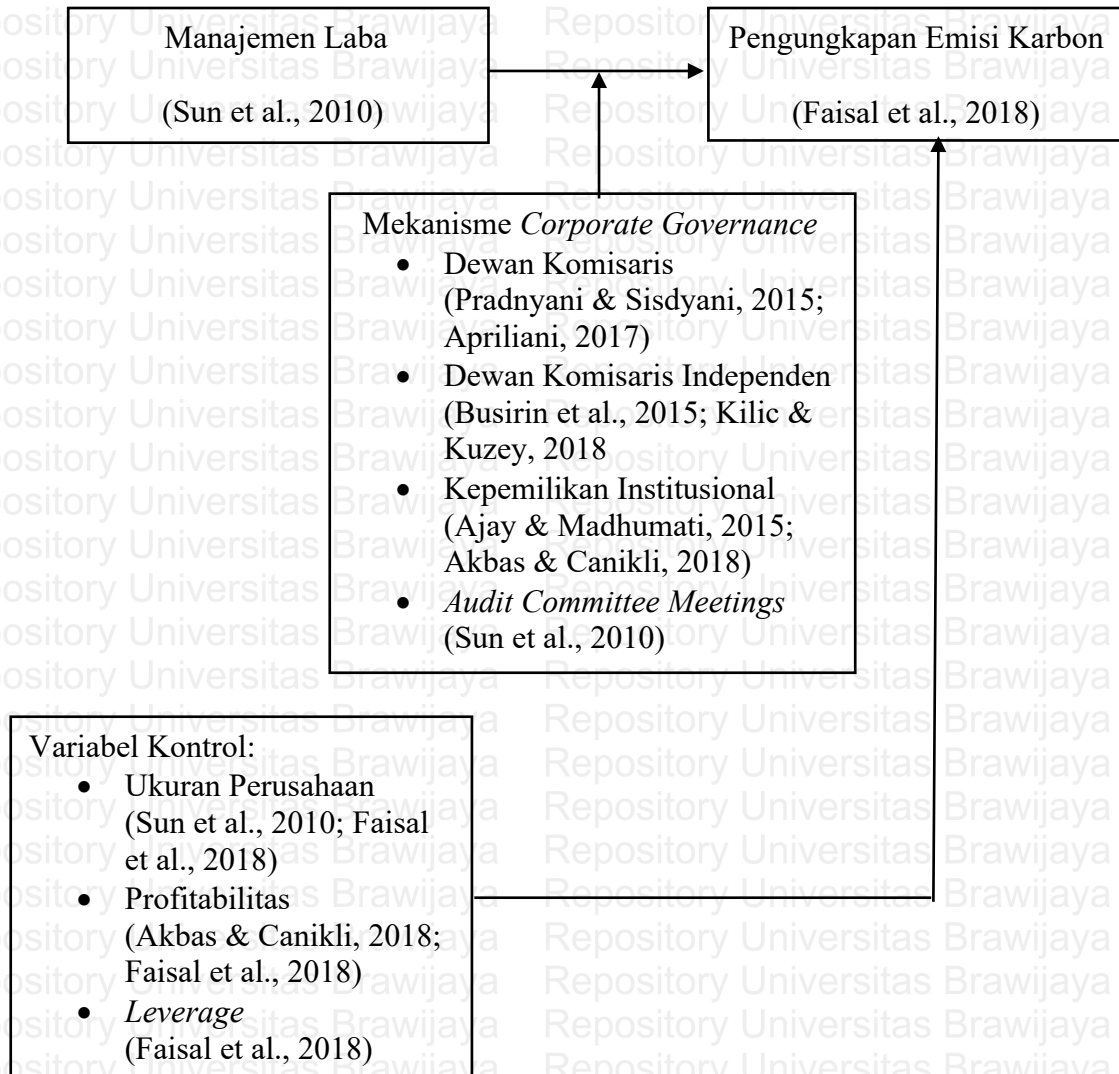
Menurut teori agensi, mekanisme *corporate governance* yang baik dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menghadapi permasalahan yang ada serta mengurangi konflik keagenan (Haniffa dan Cooke, 2002).

Pelaporan emisi karbon dalam teori agensi dapat digunakan sebagai solusi dalam mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal (Salewski & Zulch, 2014). Selain itu, pelaporan emisi karbon dapat menunjukkan seberapa besar perusahaan melaksanakan transparansi pelaporan. Penelitian Jo & Kim (2007), menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat transparansi yang semakin tinggi dapat mengurangi praktik manajemen laba. Dengan demikian, asimetri informasi dalam perusahaan tersebut semakin berkurang. Berkurangnya tingkat asimetri informasi diharapkan dapat digunakan investor untuk mendeteksi terjadinya manajemen laba.

Penelitian ini menggabungkan beberapa variabel untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan emisi karbon dengan mekanisme *corporate governance* sebagai variabel moderasi. Manajemen laba pada penelitian ini dilihat dari sisi oportunistik. Pada Gambar 3.1 berikut menggambarkan hubungan antara variabel independen yaitu manajemen laba dengan variabel dependen pengungkapan emisi karbon.

Selain itu, terdapat mekanisme *corporate governance* sebagai variabel

moderasi yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan *audit committee meetings*.



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

3.2 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang harus diuji kebenarannya secara empiris. Penelitian ini menguji pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan emisi karbon



dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi. Pengembangan hipotesis dijelaskan pada bagian berikut:

3.2.1 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa manajer tidak hanya berperan sebagai agen dari pemilik saja, melainkan dari pemangku kepentingan lainnya (Sun et al., 2010). Teori agensi menjelaskan bahwa sebagai prinsipal, investor tentunya menginginkan keuntungan dari dana yang diinvestasikannya. Sementara manajer sebagai agen menginginkan bonus maupun kompensasi sebagai imbalan atas kinerjanya. Sebagai pengendali proses pengambilan keputusan, manajer cenderung untuk memaksimalkan keuntungan diri sendiri (Prior et al., 2008). Salah satunya dengan membuat laporan keuangan yang lebih informatif (Sun et al., 2010). Tanggung jawab sosial dipandang sebagai salah satu cara mengalihkan kewaspadaan pemangku kepentingan terhadap praktik manajemen laba (Prior et al., 2008). Tanggung jawab sosial diungkapkan untuk memberikan kesan kepada para pemangku kepentingan bahwa perusahaan bersifat transparan. Pada kenyataannya, perusahaan terlibat dalam manajemen laba dibalik kesan perusahaan yang transparan (Kim et al., 2012).

Prior et al., (2008) menemukan manajemen laba berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan manajemen untuk melindungi posisi mereka dalam perusahaan dengan memenuhi permintaan pemangku kepentingan. Penelitian ini sejalan dengan Gavana et al., (2017) yang menunjukkan



bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial digunakan untuk menutupi tindakan manajemen laba yang akan berdampak langsung pada para pemangku kepentingan. Hasil ini didukung oleh penelitian Hope et al., (2013) yang menunjukkan luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dipengaruhi oleh kepentingan manajer yang oportunis.

Callery dan Perkins, (2017) menggunakan analisis forensik menemukan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial secara khusus dalam bentuk pelaporan emisi karbon terkait dengan manajemen simbolik.

Pengungkapan dilakukan untuk meningkatkan perhatian para pemangku kepentingan terhadap kinerja non keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Manajemen laba berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon

3.2.2 Peran Moderasi Ukuran Dewan Komisaris pada Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Indonesia mengadopsi sistem hukum kontinental Eropa yang memisahkan struktur dewan perusahaan kedalam dua tingkat (*two tier system*). Dewan komisaris berfungsi sebagai pengawas, sementara dewan direksi (termasuk manajemen) sebagai eksekutif. Dewan komisaris menggunakan laporan keuangan untuk menilai kinerja dewan direksi. Namun, dewan direksi seringkali memanipulasi angka dalam pencatatan untuk menyajikan laporan keuangan dengan catatan baik pada setiap periode (Nugroho & Eko, 2011). Peran utama dewan komisaris dalam tata kelola perusahaan adalah untuk memantau dan mengendalikan dewan direksi (Fama & Jensen, 1983).

Menurut Anderson et al., (2004), ukuran dewan komisaris berperan penting dalam memantau fungsi dewan direksi dan mengurangi konflik keagenan. Penelitian Obigbemi et al., (2016) menunjukkan ukuran dewan komisaris yang lebih besar dapat mengurangi manajemen laba seiring dengan latar belakang pengetahuan dan pengalaman anggota dewan yang berbeda. Ukuran dewan komisaris yang lebih besar cenderung melakukan mekanisme pemantauan dengan efektif dan mendorong pengungkapan sehingga mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham (Buerthey et al., 2019). Sejalan dengan penelitian sebelumnya, Nasih et al., (2019) juga menemukan ukuran dewan komisaris yang lebih besar berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon untuk mencapai transparansi perusahaan.

H2: Ukuran dewan komisaris memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan emisi karbon.

3.2.3 Peran Moderasi Dewan Komisaris Independen pada Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Teori agensi menjelaskan bahwa dewan komisaris independen memiliki fungsi pemantauan terhadap pelaporan keuangan (Alves, 2014). Mekanisme *corporate governance* suatu perusahaan dianggap efektif apabila perusahaan memiliki mayoritas dewan komisaris independen yang melaksanakan fungsi pemantauan terhadap manajemen (Dechow et al., 1996; Velayutham, 2014). Fungsi pemantauan dilakukan untuk mengurangi tindakan oportunistik dan asimetri informasi, dengan mengungkapkan informasi yang relevan dalam laporan tahunan. Ben-Amar & Zeghal, (2011) menunjukkan dewan komisaris independen dapat membatasi tindakan



manajemen yang oportunistik dalam pemilihan kebijakan pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Selain itu, dewan komisaris independen dapat melindungi kepentingan pemegang saham dan mengurangi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal sehingga meningkatkan kualitas pendapatan (Dechow & Dichev, 2002; Peasnell et al., 2005).

Dewan komisaris independen berperan dalam memantau kinerja manajemen agar bertindak selaras dengan kepentingan pemegang saham lainnya (Liao et al., 2014). Dewan komisaris independen memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap tuntutan dalam pengendalian emisi karbon dibandingkan dengan manajemen. Hal ini dikarenakan manajemen menganggap investasi dalam pengendalian emisi karbon hanya akan menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Sementara dewan komisaris independen memiliki keinginan untuk memberikan informasi yang transparan terkait dengan kebijakan dan emisi karbon kepada berbagai pemangku kepentingan (Rupley et al., 2012). Pengungkapan emisi karbon yang masih bersifat sukarela menyebabkan manajemen memiliki kebebasan dalam memutuskan informasi yang akan diungkapkan (Bansal et al., 2018). Oleh karena itu, dewan komisaris independen memiliki peran yang sangat penting dalam memotivasi pengungkapan emisi karbon dan bertanggung jawab atas kesejahteraan para pemangku kepentingan (Bansal et al., 2018). Penelitian sebelumnya menemukan keberadaan dewan komisaris independen mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan emisi karbon (Rupley et al., 2012; Liao et al., 2014; Kilic &

Kuzey, 2018). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: Dewan komisaris independen memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan emisi karbon.

3.2.4 Peran Moderasi Kepemilikan Institusional pada Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Fransiska et al., 2016).

Kepemilikan institusional dapat mengurangi kecenderungan manajemen untuk menghasilkan kualitas laba yang lebih tinggi dengan memanfaatkan *discretionary* dalam laporan keuangan (Sembiring, 2017). Hal ini dikarenakan kepemilikan institusional memiliki fungsi monitoring yang efektif pada praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer.

Penelitian Al-Zyoud (2012), menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional merupakan mekanisme *corporate governance* yang efektif dalam membatasi manajemen laba. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, Attig et al., (2012) menjelaskan investor institusional dalam jangka panjang berperan dalam mekanisme *corporate governance* yang efisien dalam mengurangi asimetri informasi dan masalah agensi.

Penelitian Zhou et al., (2018) menunjukkan pengungkapan emisi karbon berfungsi sebagai alat komunikasi perusahaan kepada investor. Pengungkapan ini dapat mengurangi biaya agensi dan membatasi perilaku



manajer yang oportunis. Velayutham (2014) menemukan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Hal ini menunjukkan investor institusi memiliki peran penting dalam memenuhi tekanan para pemangku kepentingan melalui pengungkapan emisi karbon. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4: Kepemilikan institusional memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan emisi karbon.

3.2.5 Peran Moderasi *Audit Committee Meetings* pada Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Teori agensi menjelaskan bahwa tingkat efektivitas komite audit dalam memantau manajemen sehubungan dengan pelaporan keuangan dan pengungkapan informasi tanggung jawab sosial bergantung pada tingkat pertemuan yang diselenggarakan (Chariri et al., 2018). Rapat komite audit dilaksanakan secara teratur setiap tahunnya untuk memastikan proses pelaporan keuangan dan pengungkapan tanggung jawab sosial berfungsi dengan baik (Soliman & Ragab, 2014). *Audit committee meetings* mengacu pada jumlah rapat yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk memantau kegiatan manajemen secara efektif (Appuhami & Tashakor, 2017).

Saleh et al., (2007) menemukan *audit committee meetings* secara signifikan berpengaruh terhadap manajemen laba. Tingginya frekuensi rapat komite audit dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap manajemen laba. Menurut Albersmann & Hohenfels (2017), frekuensi rapat yang cukup antara 4 sampai 5 kali dalam setahun dapat menunjukkan



peran komite audit secara efektif untuk mengurangi tingkat manajemen laba. Pada saat yang sama, semakin tinggi frekuensi rapat komite audit dapat membantu setiap anggota untuk memastikan kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Appuhami & Tashakor, 2017). Allegrini & Greco (2011) dan Chariri et al., (2018) menemukan *audit committee meetings* berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Semakin tinggi *audit committee meetings* dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pengungkapan emisi karbon yang dilakukan manajemen secara efektif. Pengungkapan emisi karbon menggambarkan transparansi perusahaan yang dapat digunakan sebagai sarana dalam mengurangi masalah agensi dan asimetri informasi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (Allegrini & Greco, 2011). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H5: *Audit committee meetings* memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan emisi karbon.



BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *explanatory research* yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan emisi karbon dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi.

Explanatory research digunakan untuk menjelaskan kedudukan tiap-tiap variabel dan hubungan antar variabel satu dengan yang lain (Sugiyono, 2012).

4.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri dasar dan kimia, pertanian, energi, transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 - 2018. Sektor industri tersebut merupakan empat bidang prioritas yang diusulkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), mengacu pada Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Pada tahun 2012, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 mengenai kewajiban perusahaan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada laporan tahunan. Tahun 2014 dipilih sebagai tahun pertama penelitian mengacu pada standar pelaporan



tanggung jawab sosial GRI G4 yang mulai berlaku efektif di Indonesia (GRI *Report*, 2014).

Sampel penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* tipe *judgment sampling*. *Judgment sampling* digunakan untuk memperoleh sampel sesuai dengan kriteria tertentu agar mendapatkan informasi khusus yang dibutuhkan oleh peneliti (Sekaran & Bougie, 2016: 255). Perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah yang memiliki kriteria – kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit berturut-turut selama periode 2014 - 2018.
2. Perusahaan menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan.
3. Perusahaan yang secara implisit maupun eksplisit mengungkapkan minimal satu kebijakan atau satu item pengungkapan terkait emisi karbon pada laporan tahunan periode 2014 – 2018.
4. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode 2014 - 2018, karena penelitian ini memeriksa adanya manajemen laba, sehingga kurang tepat apabila perusahaan mengalami kerugian.

4.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain (Sekaran & Bougie, 2016: 37). Adapun sumber data berupa laporan tahunan diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan *website* perusahaan. Data yang



dikumpulkan meliputi data keuangan serta data dewan komisaris, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan jumlah rapat komite audit yang diambil dari laporan tahunan perusahaan tahun 2014 – 2018. Selain itu, laporan keberlanjutan perusahaan juga digunakan untuk memperoleh data mengenai tingkat pengungkapan emisi karbon.

4.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional menjelaskan karakteristik suatu objek penelitian kedalam elemen-elemen yang dapat diobservasi, sehingga konsep tersebut dapat diukur dan dioperasionalkan dalam penelitian. Penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu manajemen laba dan variabel dependen berupa pengungkapan emisi karbon. Variabel moderasi dalam penelitian ini terdiri dari dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan rapat komite audit. Selain itu, terdapat variabel kontrol yang terdiri dari ukuran perusahaan (*size*), *profitabilitas*, dan *leverage*.

4.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan emisi karbon. Variabel pengungkapan emisi karbon diukur menggunakan *checklist* yang dikembangkan oleh Choi et al., (2013). Choi et al., (2013) mengembangkan sebuah *checklist* pengungkapan emisi karbon berdasarkan lembar permintaan informasi karbon yang dikeluarkan oleh CDP (*Carbon Disclosure Project*). *Carbon Disclosure Project* (CDP) merupakan salah satu saluran untuk pengungkapan lingkungan perusahaan secara sukarela.

Tabel 4.1
Carbon Disclosure Checklist

Kategori	Item	
Perubahan iklim: resiko dan peluang (CC / <i>Climate Change</i>)	CC - 1	Penilaian / deskripsi terhadap resiko (peraturan / regulasi khusus maupun umum) berkaitan dengan perubahan iklim dan tindakan untuk mengelola resiko tersebut.
	CC - 2	Penilaian / deskripsi saat ini (dan masa depan) dari implikasi keuangan, bisnis, dan peluang dari perubahan iklim.
Perhitungan emisi gas rumah kaca (GHG / <i>Greenhouse Gas</i>)	GHG - 1	Deskripsi metodologi yang digunakan untuk menghitung emisi gas rumah kaca (misal protokol GRK atau ISO).
	GHG - 2	Keberadaan verifikasi eksternal terhadap penghitungan kuantitas emisi GRK oleh siapa dan atas dasar apa.
	GHG - 3	Total emisi gas rumah kaca (metrik ton CO ₂ -e) yang dihasilkan.
	GHG - 4	Pengungkapan lingkup 1 dan 2, atau 3 emisi GRK langsung.
	GHG - 5	Pengungkapan emisi GRK berdasarkan asal atau sumbernya (misal: batu bara, listrik, dll.).
	GHG - 6	Pengungkapan emisi GRK menurut fasilitas atau segmen.
	GHG - 7	Perbandingan emisi GRK dengan tahun-tahun sebelumnya.
Perhitungan konsumsi energi (EC / <i>Energy Consumption</i>)	EC - 1	Jumlah energi yang dikonsumsi (misalnya tera-joule atau peta-joule).
	EC - 2	Penghitungan energi yang digunakan dari sumber daya yang dapat diperbaharui.
	EC - 3	Pengungkapan menurut jenis, fasilitas atau segmen.
Pengurangan gas rumah kaca dan biaya (RC / <i>Reduction and Cost</i>)	RC - 1	Perincian dari rencana atau strategi untuk mengurangi emisi GRK.
	RC - 2	Perincian dari tingkat target pengurangan emisi GRK saat ini dan target pengurangan emisi.
	RC - 3	Pengurangan emisi dan biaya atau tabungan (<i>costs or savings</i>) yang dicapai saat ini sebagai akibat dari rencana pengurangan emisi.
	RC - 4	Biaya emisi masa depan yang diperhitungkan dalam perencanaan belanja modal (<i>capital expenditure planning</i>).
Akuntabilitas emisi karbon (ACC/ <i>Carbon Emission Accountability</i>)	ACC - 1	Indikasi bahwa dewan komite (atau badan eksekutif lainnya) memiliki tanggung jawab atas tindakan yang berkaitan dengan perubahan iklim.
	ACC - 2	Deskripsi mekanisme bahwa dewan (atau badan eksekutif lainnya) meninjau perkembangan perusahaan yang berhubungan dengan perubahan iklim.

Sumber : Choi et al., (2013)

CDP didirikan pada tahun 2000 di Inggris sebagai organisasi nirlaba yang bertujuan untuk menjalankan suatu sistem standar pengungkapan



bagi investor, perusahaan, kota dan negara dalam mengelola dampak lingkungan. *Carbon Disclosure Project* (CDP) sampai saat ini telah memiliki database pelaporan emisi karbon yang paling komprehensif di dunia dan mendorong tingkat pengungkapan emisi karbon di 50 negara (cdp.net, diakses pada 24 Juni 2019).

Berdasarkan lembar permintaan informasi karbon CDP, Choi et al., (2013) menentukan pengungkapan emisi karbon kedalam lima kategori yaitu: perubahan iklim, resiko dan peluang (CC); perhitungan emisi gas rumah kaca (GHG); perhitungan konsumsi energi (EC); pengurangan gas rumah kaca dan biaya (RC); serta biaya dan perhitungan emisi karbon (ACC). Lima kategori pengungkapan tersebut dijabarkan kedalam 18 item penilaian spesifik. Setiap item dalam pengungkapan emisi karbon dinilai dengan skor dikotomi, yaitu 1 apabila mengungkapkan, dan 0 apabila tidak diungkapkan.

4.4.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah manajemen laba yang diproksikan dengan *conditional revenue model* yang dikembangkan oleh Stubben, 2010. Stubben (2010), memperkenalkan *conditional revenue model* karena ketidakpuasannya terhadap model akrual yang dianggap memberikan perhitungan yang bias dalam menyimpulkan hasil penelitian. Perhitungan manajemen laba dengan *conditional revenue model* menggunakan perubahan piutang dan perubahan pendapatan sebagai komponen yang memiliki hubungan empiris secara langsung.

Conditional revenue model berdasar pada *discretionary revenue* yang merupakan perbedaan antara perubahan piutang yang sebenarnya dengan perkiraan perubahan piutang berdasarkan pada model perhitungan. Piutang yang terlalu tinggi atau rendah menunjukkan adanya manajemen laba (Stubben, 2010). Pengakuan pendapatan di awal (*premature revenue recognition*) merupakan bentuk paling umum dari manajemen laba dan hal ini berdampak pada pendapatan dan piutang. Feroz et al., (1991) dalam Stubben (2010) menemukan bahwa lebih dari setengah kasus hukum SEC (*The U.S. Securities and Exchange Comission*) tahun 1982 – tahun 1989 berasal dari nilai piutang yang berlebihan atau pengakuan pendapatan di awal. Tahapan menghitung manajemen laba dengan *conditional revenue model* adalah sebagai berikut:

1. Menghitung perubahan pendapatan yang diukur dengan:

$$\frac{(\text{pendapatan tahun } t - \text{pendapatan tahun } t-1)}{\text{rata - rata total aset}}$$
2. Menghitung *size* (ukuran perusahaan) yang diperoleh melalui natural log dari total asset.
3. Menghitung *age* (umur perusahaan) melalui natural log dari umur perusahaan. Selanjutnya, *age square* diperoleh dengan mengkuadratkan hasil dari natural log umur perusahaan.
4. Menghitung *Growth Rate Revenue* (GRR)

$$\frac{(\text{pendapatan tahun } t - \text{pendapatan tahun } t-1)}{\text{pendapatan tahun } t-1}$$



GRR terdiri dari GRR_P dan GRR_N. Jika GRR bernilai negatif maka GRR_P sama dengan 0. Apabila GRR bernilai positif maka GRR_N sama dengan 0.

5. Menghitung Gross Margin (GRM)

$$\frac{(\text{pendapatan} - \text{harga pokok penjualan})}{\text{pendapatan}}$$

pendapatan

4.4.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi merupakan variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen (Sugiyono, 2012). Apabila terdapat pertambahan nilai R^2 dan lebih besar dari nol pada hasil regresi, maka terbukti adanya efek moderasi. Variabel independen dan moderasi memiliki interaksi dalam mempengaruhi variabel dependen. Variabel moderasi yang digunakan pada penelitian ini adalah mekanisme *corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* yang efektif dapat diukur dengan menggunakan dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan *audit committee meetings*.

1. Ukuran Dewan Komisaris

Two tier board system memisahkan struktur kepengurusan antara organ pengawas (*oversight / supervisory body*) dengan pengelola (*management*). Indonesia menerapkan sistem ini sejak jaman penjajahan Belanda. Dewan komisaris berfungsi sebagai pengawas, sementara dewan direksi (termasuk manajemen) sebagai eksekutif. Menurut UU No. 40 tahun 2007 tentang



Perseroan Terbatas, dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran serta memberi masukan kepada dewan direksi. Dewan komisaris dapat diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris yang ada dalam perusahaan.

2. Dewan Komisaris Independen

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT) pasal 120 ayat (2), komisaris independen dalam pedoman *good corporate governance* berasal dari pihak luar yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya. Komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dengan persyaratan tidak memiliki saham dan hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan (Nainggolan, 2015). Komisaris independen berperan dalam melakukan pengawasan baik secara umum maupun khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi masukan kepada direksi (UUPT Nomor 40 Tahun 2007). Dewan komisaris independen hanya berperan dalam memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *good corporate governance*, namun tidak turut serta dalam pengambilan keputusan (KNKG, 2006). Menurut Liao et al., (2014), untuk mengetahui proporsi dewan komisaris independen dapat diukur dengan:

Jumlah dewan komisaris
independen

$$\text{COMMIND} = \frac{\text{Jumlah dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh dewan komisaris}} \times 100\%$$

3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusi (Kusumawardhani, 2012). Investor institusional memiliki insentif lebih besar dalam mengawasi kinerja manajemen dibandingkan dengan investor individual (Al-Zyoud, 2012). Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh investor institusional dapat mendorong manajemen untuk mengambil tindakan yang bermanfaat dalam jangka panjang (Al-Zyoud, 2012). Menurut Kusumawardhani (2012), pengukuran kepemilikan institusional dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{INSOWN} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

4. Audit Committee Meetings

Komite audit memiliki peranan penting dalam mengawasi dan memantau proses pelaporan keuangan, pengendalian internal dan audit eksternal perusahaan (Sutaryo et al., 2011). Surat Keputusan Badan Pengelola dan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) melalui Kep-29/PM/2004 menetapkan komite audit sebagai bagian dari *good corporate governance*. Komite audit dapat mengadakan rapat secara rutin untuk menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya



(Sutaryo et al., 2011). Namun, tidak ada regulasi yang menetapkan frekuensi rapat komite audit dalam setiap tahunnya (Sutaryo et al., 2011). Menurut Saleh et al., (2007), semakin sering frekuensi rapat komite audit menunjukkan mekanisme pemantauan yang lebih baik oleh komite audit. Secara khusus, frekuensi rapat menggambarkan upaya komite audit yang dapat diukur secara langsung dalam memenuhi fungsi monitoring (Prabowo, 2017). *Audit committee meetings* menurut Kusumaningtyas & Farida (2015) dapat diukur dengan jumlah rapat yang dilakukan dalam tahun berjalan.

4.4.4 Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 2012). Variabel kontrol bukan variabel utama yang diteliti namun mempunyai pengaruh. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (*size*), profitabilitas (ROA) dan *leverage* (LEV).

1. Ukuran Perusahaan (*Size*)

Perusahaan besar menghadapi tekanan yang lebih besar dari para pemangku kepentingan untuk mengungkapkan kebijakan dan kinerja lingkungan terkait dengan emisi karbon (Yunus et al., 2006). Perusahaan besar cenderung mengungkapkan informasi emisi karbon secara sukarela karena perhatian publik yang relatif tinggi (Velayutham, 2014). Perusahaan dengan tingkat visibilitas dan sumber daya yang lebih besar memiliki insentif untuk mengurangi



dampak dari kegiatan operasional terhadap lingkungan (Faisal et al., 2018). Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan natural log dari total aset (Velayutham, 2014; Kilic & Kuzey, 2018).

2. Profitabilitas (ROA)

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan seluruh modal untuk memperoleh pendapatan atau laba (Pahuja, 2009). Perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki kemampuan untuk mengeluarkan biaya dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi pengungkapan emisi karbon (Choi et al., 2013). Faisal et al., (2018) menunjukkan perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi memiliki insentif untuk mengungkapkan pelaporan emisi karbon. Perusahaan ingin menunjukkan bahwa mereka tidak sekedar mencari keuntungan saja, melainkan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selain itu, pengungkapan informasi emisi karbon yang lebih luas juga dapat mengurangi tekanan dan meningkatkan hubungan dengan para pemangku kepentingan (Faisal et al., 2018). Profitabilitas dapat diukur dengan rumus berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

3. Leverage (LEV)

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang jangka panjang dan

jangka pendek (Pahuja, 2009). Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi sangat berhati – hati dalam mengeluarkan biaya terkait dengan pengurangan emisi karbon (Luo et al., 2013). Rasio *leverage* yang semakin tinggi akan mengurangi kemampuan perusahaan dalam mengungkapkan informasi emisi karbon. Di sisi lain, kegiatan operasional perusahaan bergantung pada pendanaan yang diberikan kreditor. Oleh karena itu, perusahaan akan mengungkapkan lebih banyak informasi emisi karbon untuk memenuhi harapan kreditor (Rankin et al., 2011). *Leverage* dapat diukur dengan rumus berikut:

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

4.5 Metode Analisis Data

4.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan atau memperoleh gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel.

Statistik deskriptif memberikan gambaran melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi untuk menjadi patokan analisis lebih lanjut. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi pengungkapan emisi karbon, manajemen laba, dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan *audit committee meetings*.



4.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk menguji persamaan regresi yang telah ditentukan agar data yang diolah tidak bias. Selain itu, data diharapkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi sehingga menghasilkan data yang baik. Uji asumsi klasik pada penelitian ini meliputi:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan independen dalam model regresi berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan *one sample Kolmogorov-Smirnov test*. Data berdistribusi normal apabila memiliki nilai signifikansi $> 0,05$.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas dapat mengakibatkan nilai koefisien regresi kurang dapat dipercaya. Selain itu, akan mengalami kesulitan dalam memisahkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Oktafia, 2013). Adanya multikolinearitas pada model regresi ditunjukkan dengan besaran VIF (*variance inflation factor*) > 10 dan *tolerance* $< 0,10$.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat variabel yang tidak konstan dalam model regresi. Hal ini



menimbulkan penaksiran (*estimation*) yang tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun besar. Pengujian heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat pola pada grafik *scatterplot*. Apabila pada grafik *scatterplot* terdapat titik – titik yang membentuk suatu pola yang jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka terjadi heterokedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode $t - 1$ (Oktafia, 2013). Autokorelasi timbul karena penelitian bersifat *time series*. Adanya autokorelasi dapat diketahui dengan menggunakan uji *Durbin Watson*. Apabila nilai $dU < DW < 4-dU$ maka tidak terjadi autokorelasi.

4.5.3 Analisis Regresi Moderasi

Penelitian ini menggunakan metode analisis data *moderate regression analysis* (MRA). MRA menggunakan pendekatan analitik untuk mempertahankan integrasi sampel dan mengontrol pengaruh variabel moderasi (Ghozali, 2009: 203). Metode ini dipilih karena dapat menjelaskan secara terperinci pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan variabel moderasi. Pengujian data dilakukan menggunakan software IBM SPSS *statistics* 23. Model analisis regresi melalui 2 tahapan diantaranya:

1. Analisis model regresi 1 dengan memasukkan variabel dependen dan independen. Model regresi 1 digunakan untuk menguji hipotesis 1.
2. Analisis model regresi 2 dengan memasukkan variabel dependen dan independen, moderasi dan interaksi antar variabel independen dengan variabel moderasi. Model regresi 2 digunakan untuk menguji hipotesis 2, 3 dan 4.

Model analisis regresi dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

$$CED = \alpha + \beta_1 EM + \beta_2 SIZE + \beta_3 ROA + \beta_4 LEV + e$$

$$CED = \alpha + \beta_1 EM + \beta_2 COMMSIZE + \beta_3 COMMIND + \beta_4 INSOWN + \beta_5 AUDIT + \beta_6 EM * COMMSIZE + \beta_7 EM * COMMIND + \beta_8 EM * INSOWN + \beta_9 EM * AUDIT + \beta_{10} SIZE + \beta_{11} ROA + \beta_{12} LEV + e$$

Keterangan:

CED	: Pengungkapan emisi karbon perusahaan
EM	: Manajemen laba
COMMSIZE	: Ukuran Dewan Komisaris
COMMIND	: Dewan Komisaris Independen
INSOWN	: Kepemilikan institusional
AUDIT	: <i>Audit committee meetings</i>
EM* COMMSIZE	: Interaksi antara manajemen laba dengan ukuran dewan komisaris
EM* COMMIND	: Interaksi antara manajemen laba dengan dewan komisaris independen
EM*INSOWN	: Interaksi antara manajemen laba dengan kepemilikan institusional
EM*AUDIT	: Interaksi antara manajemen laba dengan <i>audit committee meetings</i>
SIZE	: Ukuran perusahaan
ROA	: Profitabilitas
LEV	: Leverage
e	: Error

4.5.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian keempat hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji

t. Uji t dilakukan untuk menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian melalui uji t juga dilakukan untuk mengetahui peran variabel moderasi pada pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan nilai t dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 5 %. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri dasar dan kimia, pertanian, energi, transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 - 2018. Jumlah perusahaan yang terdaftar selama 2014-2018 adalah sebanyak 116 perusahaan. *Judgment sampling* merupakan metode pengambilan sampel dengan beberapa kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh jumlah sampel sebanyak 12 perusahaan. Data observasi yang diperoleh selama 5 tahun pengamatan sebanyak 60 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Hasil Judgment Sampling

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan
	Perusahaan sektor industri dasar dan kimia, pertanian, energi, transportasi yang terdaftar di BEI 2014 - 2018	116
1	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit berturut-turut selama periode 2014 – 2018	(4)
2	Perusahaan yang secara implisit maupun eksplisit tidak mengungkapkan minimal satu kebijakan atau satu item pengungkapan terkait emisi karbon pada laporan tahunan periode 2014 – 2018.	(80)
3	Perusahaan menggunakan mata uang selain rupiah (US\$)	(10)
4	Perusahaan mengalami kerugian	(10)
Total		12
Pengamatan selama 5 tahun (2014-2018)		60

Sebanyak 2 perusahaan dari 12 sampel yaitu Indocement Tungal Prakarsa Tbk, dan Semen Indonesia (Persero) Tbk, telah melakukan

pengurangan emisi karbon dengan menjalankan *Clean Development Mechanism* (CDP) mengacu pada ketentuan Protokol Kyoto. Kedua perusahaan tersebut mendapatkan *Certified Emission Reduction* (CER) yaitu sertifikat pengurangan emisi oleh perusahaan dan memiliki nilai keuangan. Salah satunya, CER Semen Indonesia (Persero) Tbk, sebesar 213.777 ton CO₂ eq yang diterbitkan oleh *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) telah dibeli oleh Swedia senilai 3,75 euro.

5.2 Hasil Analisis

5.2.1 Hasil Statistik Deskriptif

Sebelum melakukan uji regresi, penelitian ini dimulai dengan uji statistik deskriptif terlebih dahulu. Uji statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran dari obyek yang diteliti meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Data yang dianalisis meliputi pengungkapan emisi karbon (CED), manajemen laba (EM), ukuran dewan komisaris (COMMSIZE), ukuran dewan komisaris independen (COMMIND), kepemilikan institusional (INSOWN), dan *audit committee meetings* (AUDIT). Tabel 5.2 menunjukkan hasil uji statistik deskriptif terhadap variabel yang diteliti.

Manajemen laba (EM) diukur menggunakan *conditional revenue model* Stubben (2010). Perhitungan manajemen laba pertama-tama dilakukan dengan melakukan uji regresi pada setiap proksi untuk memperoleh nilai koefisien dalam menghitung manajemen laba.



Selanjutnya, diperoleh nilai minimum manajemen laba sebesar -76,9053 dan nilai maksimum sebesar 15,4453 dengan standar deviasi sebesar 10,953. Standar deviasi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata yaitu -24,50 menunjukkan bahwa sebaran data bersifat normal.

Tabel 5.2
Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
EM	60	-76,9053	15,4453	-24,50	10,953
CED	60	1	15	5,00	4,310
COMMSIZE	60	2	8	5,27	1,676
COMMIND	60	0,2000	0,6667	0,41	0,101
INSOWN	60	0,1397	0,9901	0,67	0,218
AUDIT	60	2	15	7,57	3,670
SIZE	60	14,0460	17,7504	15,97	0,984
ROA	60	0,0008	0,2078	0,08	0,046
LEV	60	0,0715	0,6637	0,35	0,153

Pengungkapan emisi karbon (CED) sebagai variabel dependen dalam penelitian ini dinilai dengan skor dikotomi 1 apabila mengungkapkan dan 0 apabila tidak diungkapkan. Pengungkapan emisi karbon yang dinilai dengan *checklist* pengungkapan *Carbon Disclosure Project* (CDP), terdiri dari 18 item pengungkapan. Selanjutnya, diperoleh nilai minimum untuk tingkat pengungkapan emisi karbon sebesar 1, nilai maksimum sebesar 15, rata-rata sebesar 5,00 dan standar deviasi sebesar 4,310. Tingkat pengungkapan emisi karbon terbesar dimiliki oleh Indocement Tungal Prakarsa Tbk.

Ukuran dewan komisaris (COMMSIZE) sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Nilai maksimum untuk ukuran dewan komisaris sebesar 8, nilai minimum sebesar 2, nilai rata-rata sebesar 5,27, dan standar deviasi



sebesar 1,676. Ukuran dewan komisaris terkecil dimiliki oleh Sawit Sumbermas Sarana Tbk. Sedangkan yang terbesar dimiliki oleh PP London Sumatra Indonesia Tbk dan Blue Bird Tbk.

Ukuran dewan komisaris independen (COMMIND) diukur dengan jumlah dewan komisaris independen dibagi dengan jumlah seluruh dewan komisaris. Nilai minimum untuk ukuran dewan komisaris independen diperoleh sebesar 0,2000, nilai maksimum 0,6667, rata-rata 0,41 dan standar deviasi sebesar 0,101. Semen Baturaja (Persero) Tbk memiliki ukuran dewan komisaris terkecil, sementara yang terbesar dimiliki oleh Sampoerna Agro Tbk.

Kepemilikan institusional (INSOWN) dalam penelitian ini diukur dengan membagi antara jumlah saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham perusahaan yang beredar. Nilai minimum dan maksimum untuk kepemilikan institusional masing-masing sebesar 0,1397 dan 0,9901. Tingkat kepemilikan institusional terendah dimiliki oleh Arwana Citramulia Tbk. Sedangkan yang tertinggi dimiliki oleh Semen Indonesia (Persero) Tbk. Nilai rata-rata kepemilikan institusional sebesar 0,67 dan standar deviasi sebesar 0,218. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari rata-rata menunjukkan bahwa keragaman data kepemilikan institusional tergolong rendah.

Variabel moderasi selanjutnya adalah *audit committee meetings* (AUDIT) yang diukur dengan jumlah rapat yang dilakukan komite audit setiap tahunnya, dengan rata-rata sebesar 7,57. Nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar 2 dan 15. Jumlah rapat komite audit



terendah dimiliki oleh Blue Bird Tbk dan yang tertinggi dimiliki oleh Ashashimas Flat Glass Tbk. Sementara itu, variabel ini memiliki nilai standar deviasi sebesar 3,670.

Ukuran perusahaan (SIZE) sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan natural log dari total aset. Nilai minimum dan maksimum dari ukuran perusahaan masing-masing sebesar 14,0460 dan 17,7504. Variabel ini memiliki nilai rata-rata sebesar 15,97 dan standar deviasi sebesar 0,984. Ukuran perusahaan terkecil dimiliki oleh Arwana Citramulia Tbk, sedangkan yang terbesar dimiliki Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Profitabilitas yang diukur dengan menggunakan *return on assets* (ROA) memiliki nilai rata-rata 0,08 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,046. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibanding rata-rata menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan yang besar antara nilai minimum dan maksimum dari tingkat profitabilitas perusahaan. Nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing variabel ini adalah sebesar 0,0008 dan 0,2078. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas terendah dimiliki oleh Sampoerna Agro Tbk dan tertinggi dimiliki oleh Arwana Citramulia Tbk.

Variabel kontrol selanjutnya dalam penelitian ini adalah *leverage* dengan nilai rata-rata sebesar 0,35. Sementara itu, untuk standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum untuk variabel ini masing masing sebesar 0,153, 0,0715, dan 0,6637. Japfa comfeed Indonesia Tbk memiliki tingkat

leverage tertinggi dan yang terendah dimiliki oleh Semen Baturaja (Persero) Tbk.

5.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data residual berdistribusi normal, sehingga model regresi yang diajukan memenuhi standar kelayakan. Penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov Smirnov untuk mengetahui distribusi data tersebut. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.3
Hasil Uji Normalitas

	Asymp. Sig	Keterangan
Model 1	0,200	Data Normal
Model 2	0,200	Data Normal

Kriteria pengujian menyebutkan bahwa data residual dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi (Asymp.Sig) > dari tingkat signifikansi ($\alpha=0,05$). Berdasarkan nilai signifikansi yang ditunjukkan pada Tabel 5.3 untuk model 1 dan model 2 sebesar 0,200 atau dengan kata lain lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data residual pada model penelitian berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen satu dan yang lain dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah ketika masing-masing



variabel independen tidak memiliki korelasi yang sempurna.

Penelitian ini menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance* sebagai indikator untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas ditujukan dalam Tabel 5.4.

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas. Hasil perhitungan VIF pada model regresi 1 dan 2 memiliki nilai tidak lebih dari 10. Selain itu, nilai *tolerance* pada kedua model regresi tidak ada yang bernilai kurang dari 0,1.

Tabel 5.4
Hasil Uji Multikolinearitas

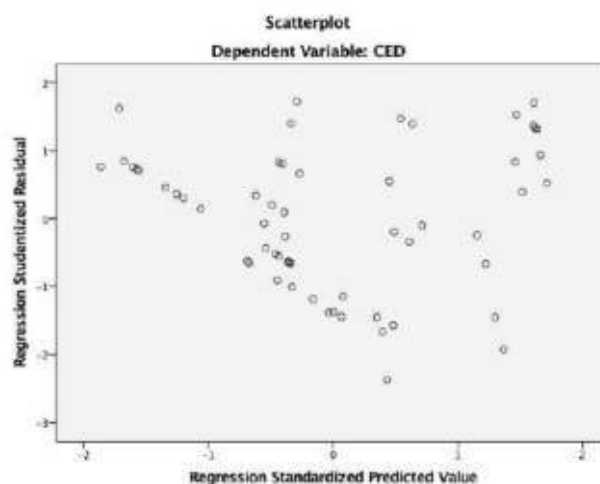
	Model 1		Model 2		Keterangan
	Tolerance	VIF	Tolerance	VIF	
EM	0,873	1,145	0,167	6,002	Tidak ada multikolinearitas
COMMSIZE			0,206	4,858	Tidak ada multikolinearitas
COMMIND			0,415	2,411	Tidak ada multikolinearitas
INSOWN			0,189	5,294	Tidak ada multikolinearitas
AUDIT			0,153	6,518	Tidak ada multikolinearitas
EM*COMMSIZE			0,125	8,015	Tidak ada multikolinearitas
EM*COMMIND			0,123	8,128	Tidak ada multikolinearitas
EM*INSOWN			0,110	9,106	Tidak ada multikolinearitas
EM*AUDIT			0,111	8,988	Tidak ada multikolinearitas
SIZE	0,988	1,012	0,536	1,866	Tidak ada multikolinearitas
ROA	0,714	1,401	0,541	1,848	Tidak ada multikolinearitas
LEV	0,764	1,309	0,511	1,956	Tidak ada multikolinearitas

Keterangan:

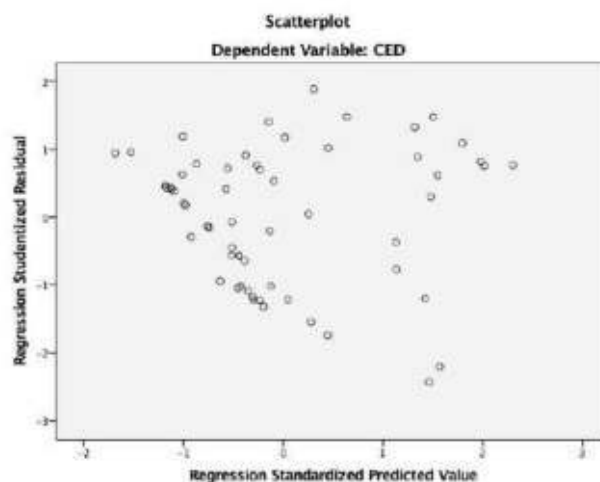
EM= Manajemen laba, COMMSIZE= Ukuran dewan komisaris, COMMIND= Ukuran dewan komisaris independen, INSOWN= Tingkat kepemilikan institusional, AUDIT= *Audit committee meetings*, EM*COMMSIZE= Interaksi variabel manajemen laba dengan ukuran dewan komisaris, EM*COMMIND= Interaksi variabel manajemen laba dengan ukuran dewan komisaris independen, EM*INSOWN= Interaksi variabel manajemen laba dengan kepemilikan institusional, EM*AUDIT= Interaksi variabel manajemen laba dengan *audit committee meetings*, SIZE= Ukuran perusahaan, ROA= Profitabilitas, LEV= Leverage.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi yang diajukan dalam penelitian ini memiliki ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan dan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang memiliki *variance* homogen atau tidak terjadi heterokedastisitas. Homokedastisitas terjadi ketika *variance* dari residual antara satu pengamatan dan yang lain bersifat tetap. Adanya heterokedastisitas dapat diketahui dengan mengacu pada grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residual (SRESID). Apabila titik-titik dalam grafik membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas. Gambar 5.1 berikut menyajikan hasil pengujian heterokedastisitas untuk model 1 dan model 2 disajikan pada gambar 5.2.



Gambar 5.1
Hasil Uji Heterokedastisitas Model 1



Gambar 5.2
Hasil Uji Heterokedastisitas Model 2

Kedua gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik *scatterplot* tidak membentuk pola tertentu dan menyebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kedua model regresi yang diajukan dalam penelitian ini tidak memiliki masalah heterokedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi antara kesalahan pengganggu yang terjadi pada model regresi untuk periode t dengan periode $t-1$. Model regresi yang baik adalah yang memiliki kesalahan pengganggu yang tidak berkorelasi. Penelitian ini menggunakan Uji *Durbin Watson* untuk menguji adanya autokorelasi. Tabel 5.5 menunjukkan hasil pengujian autokorelasi.

Tabel 5.5
Hasil Uji Autokorelasi

	dU	DW	4- dU	dL
Model 1	1,727	1,742	2,273	1,444
Model 2	2,079	1.854	1,921	1,145

Model regresi bebas dari permasalahan autokorelasi apabila nilai $dU < DW < 4-dU$. Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi untuk model 1, menunjukkan nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 1,742 dengan batas bawah (dL) sebesar 1,444 dan batas atas (dU) sebesar 1,727. Nilai uji DW untuk model 1 berada di antara dU dan $4-dU$, yaitu $1,727 < 1,742 < 2,273$. Oleh karena itu, model 1 bebas dari autokorelasi.

Uji autokorelasi model 2 menunjukkan nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 1,854 dengan batas bawah (dL) sebesar 1,145 dan batas atas (dU) sebesar 2,079. Nilai uji DW model 2 berada diantara dL dan dU, yaitu $1,145 < 1,854 < 2,079$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya autokorelasi masih belum dapat disimpulkan. Oleh karena itu, pengujian dilanjutkan dengan menggunakan *runs test* untuk memastikan ada atau tidaknya autokorelasi. Gambar 5.3 menunjukkan hasil *runs test*.

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.34135
Cases < Test Value	30
Cases ≥ Test Value	30
Total Cases	60
Number of Runs	24
Z	-1.823
Asymp. Sig. (2-tailed)	.068
a. Median	

Gambar 5.3
Hasil Uji *Runs Test*

Hasil *runs test* pada gambar 5.3 menunjukkan nilai signifikansi $0,068 > 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa model 2 bebas dari autokorelasi.

5.2.3 Hasil Analisis Regresi

Setelah melalui uji asumsi klasik untuk mengetahui kelayakan model regresi yang diajukan, tahapan selanjutnya adalah melakukan uji regresi. Uji regresi dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu uji regresi tanpa variabel moderasi untuk memenuhi hipotesis pertama mengenai pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan emisi karbon. Kedua, uji regresi dengan variabel moderasi menggunakan pendekatan *moderate regression analysis* (MRA).

5.2.3.1 Hasil Analisis Regresi Tanpa Moderasi

Analisis regresi tanpa moderasi dilakukan terhadap variabel independen yaitu manajemen laba terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan emisi karbon. Tabel 5.6 berikut menunjukkan hasil pengujian hipotesis untuk model 1.

Tabel 5.6
Hasil Analisis Regresi Tanpa Moderasi

	Koefisien	t hitung	Sig.	Keterangan
EM	0,085	2,462	0,017**	Diterima
SIZE	1,340	3,903	0,000**	
ROA	4,161	0,426	0,672	
LEV	-3,298	-1,188	0,240	
Konstanta	-4,657	-1,467	0,148	
Adjusted R ²	0,254			
F-Value	6,015		0,000	

**Sig. pada level 0,05 ($p < 0,05$)

Keterangan: EM= Manajemen laba, SIZE= Ukuran perusahaan, ROA= Profitabilitas, LEV= Leverage.

Berdasarkan hasil pengujian regresi pada Tabel 5.6, maka diperoleh model regresi sebagai berikut:

Model 1:

$$CED = -4,657 + 0,085 EM + 1,340 SIZE + 4,161 ROA - 3,298 LEV + e$$

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Penggunaan R^2 memiliki kelemahan diantaranya memiliki bias terhadap jumlah variabel independen, sehingga penggunaan nilai *adjusted* R^2 dianjurkan untuk mengevaluasi model regresi terbaik (Ghozali, 2011: 79).

Model 1 memiliki nilai *adjusted* R^2 sebesar 0,254 yang menunjukkan bahwa, manajemen laba serta variabel kontrol *size*, ROA, dan *leverage* mampu menjelaskan variabel dependen yaitu pengungkapan emisi karbon sebesar 25,4%. Sisanya yaitu sebesar 74,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. *F-value* untuk model 1 sebesar 6,015 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model 1 dapat digunakan untuk memprediksi besar pengungkapan emisi karbon.

Model 1 menunjukkan nilai koefisien regresi manajemen laba (EM) terhadap pengungkapan emisi karbon sebesar 0,085 dengan nilai signifikansi 0,017. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel manajemen laba berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

5.2.3.2 Hasil Analisis Regresi Dengan Moderasi

Analisis regresi moderasi dilakukan terhadap variabel independen yaitu manajemen laba terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan



emisi karbon. dan variabel moderasi ukuran dewan komisaris, ukuran dewan komisaris independen, tingkat kepemilikan institusional dan *audit committee meetings*. Tabel 5.7 berikut menunjukkan hasil pengujian hipotesis untuk model 2.

Tabel 5.7
Hasil Analisis Regresi Dengan Moderasi

	Koefisien	t hitung	Sig.	Keterangan
EM	0,298	3,688	0,001**	Diterima
COMMSIZE	-1,061	-2,125	0,039	
COMMIND	1,331	0,260	0,796	
INSOWN	-1,689	-0,448	0,656	
AUDIT	0,137	0,584	0,562	
EM* COMMSIZE	-0,041	-3,159	0,003**	Diterima
EM* COMMIND	-3,613	-0,278	0,782	Ditolak
EM*INSOWN	4,200	0,250	0,803	Ditolak
EM*AUDIT	-132,624	-0,619	0,539	Ditolak
SIZE	2,623	4,393	0,000**	
ROA	6,817	0,665	0,509	
LEV	-3,565	-1,115	0,270	
Konstanta	-10,325	-2,190	0,034	
Adjusted R ²	0,353			
F-Value	3,658		0,001	

**Sig. pada level 0,05 (p<0,05)

Keterangan:

EM= Manajemen laba, COMMSIZE= Ukuran dewan komisaris, COMMIND= Ukuran dewan komisaris independen, INSOWN= Tingkat kepemilikan institusional, AUDIT= *Audit committee meetings*, EM*COMMSIZE= Interaksi variabel manajemen laba dengan ukuran dewan komisaris, EM*COMMIND= Interaksi variabel manajemen laba dengan ukuran dewan komisaris independen, EM*INSOWN= Interaksi variabel manajemen laba dengan kepemilikan institusional, EM*AUDIT= Interaksi variabel manajemen laba dengan *audit committee meetings*, SIZE= Ukuran perusahaan, ROA= Profitabilitas, LEV= *Leverage*.

Berdasarkan hasil pengujian regresi moderasi pada Tabel 5.7, maka diperoleh model regresi moderasi sebagai berikut.

Model 2:

$$\text{CED} = -10,325 + 0,298 \text{ EM} - 1,061 \text{ COMMSIZE} + 1,331 \text{ COMMIND} - 1,689 \beta_4 \text{ INSOWN} + 0,137 \text{ AUDIT} - 0,041 \text{ EM*COMMSIZE} - 3,613 \text{ EM*COMMIND} + 4,200 \text{ EM*INSOWN} - 132,624 \text{ EM*AUDIT} + 2,623 \text{ SIZE} + 6,817 \text{ ROA} - 3,565 \text{ LEV} + e$$



Model 2 memiliki nilai *adjusted R*² sebesar 0,353 yang menunjukkan bahwa, manajemen laba, variabel interaksi manajemen laba dengan ukuran dewan komisaris, ukuran dewan komisaris independen, tingkat kepemilikan institusional, *audit committee meetings* dan variabel kontrol mampu menjelaskan variabel dependen yaitu pengungkapan emisi karbon sebesar 35,3%. Sisanya yaitu sebesar 64,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Nilai *R*² pada model 2 lebih tinggi dibandingkan model 1, sehingga dapat dikatakan bahwa model 2 memiliki efek moderasi.

Mekanisme *corporate governance* memiliki efek moderasi yang menunjukkan bahwa variabel tersebut dapat mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen. F-value untuk model 2 sebesar 3,685 dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model 2 layak untuk digunakan dalam memprediksi variabel pengungkapan emisi karbon.

Hasil analisis regresi moderasi untuk hipotesis 2 yang menguji peran moderasi dewan komisaris pada pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan emisi karbon ditujukan pada tabel 5.7. Tabel 5.7 menunjukkan koefisien negatif sebesar 0,041 dengan signifikansi 0,003. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris dapat memoderasi dengan memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan emisi karbon, dengan demikian hipotesis 2 diterima.

Hipotesis 3 menguji peran moderasi dewan komisaris independen pada pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan emisi karbon. Berdasarkan tabel 5.7, model regresi moderasi menunjukkan nilai koefisien

negatif sebesar 3,613 dengan nilai signifikansi 0,782. Hasil ini menunjukkan adanya pengaruh negatif namun tidak signifikan antara manajemen laba dengan moderasi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan emisi karbon, sehingga hipotesis 3 ditolak. Manajemen laba dengan moderasi ukuran dewan komisaris independen, tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan tingkat pengungkapan emisi karbon.

Hasil pengujian hipotesis 4 mengenai pengaruh manajemen laba dengan moderasi kepemilikan institusional terhadap pengungkapan emisi karbon pada tabel 5.7, memperoleh nilai koefisien 4,200 dengan signifikansi 0,803. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi hubungan antara manajemen laba dengan pengungkapan emisi karbon sehingga, hipotesis 4 ditolak.

Hipotesis 5 menguji peran moderasi *audit committee meetings* pada pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan emisi karbon. Berdasarkan tabel 5.7, model regresi moderasi menunjukkan nilai koefisien -132,624 dengan nilai signifikansi 0,539. Hasil ini menunjukkan adanya pengaruh negatif namun tidak signifikan antara manajemen laba dengan moderasi *audit committee meetings* terhadap pengungkapan emisi karbon, sehingga hipotesis 5 ditolak. Semakin tinggi manajemen laba dengan *audit committee meetings*, tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan tingkat pengungkapan emisi karbon.



5.3 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

Bagian ini akan menjelaskan hasil pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Pembahasan akan dimulai dari hasil pengujian hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 5.

5.3.1 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Emisi

Karbon

Hasil pengujian hipotesis 1 secara statistik menunjukkan bahwa H1 diterima. Manajemen yang melakukan praktik manajemen laba menggunakan pengungkapan emisi karbon untuk melindungi kepentingan diri sendiri, dan mengalihkan kewaspadaan para pemangku kepentingan terhadap kinerja manajemen. Pada akhirnya, peningkatan pengungkapan emisi karbon bertujuan untuk memenuhi harapan *stakeholder* dan meningkatkan reputasi perusahaan.

Temuan ini mendukung asumsi teori *stakeholder*. Teori *stakeholder* menyebutkan bahwa ketika asimetri informasi semakin tinggi, maka manajer akan berusaha untuk memenuhi tuntutan para pemangku kepentingan. Kekuatan *stakeholder* dan kinerja keuangan sangat berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan perusahaan (Roberts, 1992). *Stakeholder* memiliki anggapan bahwa perusahaan yang melakukan pengungkapan informasi tambahan dalam pelaporan keuangan seperti informasi emisi karbon, terkait dengan tingkat transparansi yang semakin baik. Pada kenyataannya, peningkatan transparansi bertujuan untuk memanfaatkan perhatian publik dibalik adanya manipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen (Zhou et al., 2018).

Hasil penelitian mendukung asumsi teori agensi yang menekankan bahwa pada dasarnya manusia cenderung mementingkan diri sendiri (*self-interest*) dan menghindari resiko. Ketika perusahaan dikelola oleh seseorang atau sekelompok orang yang bukan pemilik, maka pihak tersebut tidak akan bekerja demi keuntungan pemilik. Di sisi lain, perusahaan harus memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan yang berdampak bagi kelangsungan hidup perusahaan. Salah satunya, tuntutan para pemangku kepentingan dalam pengendalian masalah sosial dan lingkungan seperti emisi karbon. Beberapa tekanan yang dihadapi perusahaan baik dari sisi sosial dan ekonomi, mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi emisi karbon (Luo & Tang, 2014). Pengungkapan dapat mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal yang berpengaruh terhadap biaya agensi (Verrecchia, 2001). Informasi emisi karbon yang diungkapkan secara sukarela dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, yang mempengaruhi pandangan investor akan kinerja perusahaan di masa mendatang. Oleh karena itu, manajer menggunakan informasi yang dimiliki untuk mengungkapkan informasi tambahan yang relevan dalam pengungkapan untuk meningkatkan nilai pasar.

Temuan ini mendukung penelitian Prior et al., (2008); Velayutham (2014); Gavana et al., (2017) yang menyebutkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial digunakan untuk menutupi tindakan manajemen laba yang akan berdampak langsung kepada para pemangku kepentingan. Peningkatan pengungkapan emisi karbon digunakan untuk menimbulkan

citra bahwa perusahaan memiliki etika yang baik dibalik adanya kepentingan pribadi manajemen. Pengungkapan emisi karbon dapat memberikan citra positif yang akan mempengaruhi reputasi perusahaan (Kim et al., 2012). Pengungkapan emisi karbon digunakan oleh manajemen untuk menutupi kesalahan yang dilakukan agar perusahaan dapat beroperasi dengan reputasi yang baik (Hemingway & MacLagan, 2004).

Kasperit dan Lopatta (2018) menyebutkan bahwa manajemen laba memiliki keterkaitan yang lebih erat dengan pengungkapan informasi lingkungan secara sukarela khususnya emisi karbon dikarenakan tiga alasan utama. Pertama, pengungkapan informasi emisi karbon menggambarkan bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik, sehingga mendapatkan penilaian pasar yang positif. Kedua, pengukuran emisi karbon yang sangat kompleks memberikan kesempatan kepada manajemen untuk memanipulasi data sampai dengan batas tertentu, sehingga sulit untuk mengetahui tingkat akurasi dan konsistensi dari pengukuran tersebut. Ketiga, belum adanya standar pengungkapan emisi menyebabkan nilai emisi yang dilaporkan menjadi bias.

5.3.2 Peran Moderasi Ukuran Dewan Komisaris pada Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Pengujian regresi variabel interaksi manajemen laba dengan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan emisi karbon menunjukkan pengaruh dengan koefisien negatif signifikan. Dewan komisaris terbukti dapat menjadi variabel moderasi dengan memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan emisi karbon. Perusahaan dengan jumlah dewan komisaris yang semakin tinggi dapat mengurangi



pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan emisi karbon. Hasil penelitian sejalan dengan teori agensi yang menyebutkan bahwa, mekanisme *corporate governance* yang baik salah satunya didukung dengan ukuran dewan komisaris yang semakin besar untuk meningkatkan transparansi perusahaan melalui pelaporan emisi karbon. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris berperan dalam mengurangi manajemen laba dan mempengaruhi tingkat pengungkapan emisi karbon yang tidak hanya digunakan sebagai bentuk simbolik oleh manajemen dalam menutupi tindakan oportunistik yang dilakukan. Selain itu, temuan ini sejalan dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa kepuasan para pemangku kepentingan menjadi perhatian penting bagi perusahaan karena akan mempengaruhi kelangsungan hidup suatu usaha.

Keberagaman latar belakang pendidikan maupun keahlian dalam ukuran dewan komisaris yang semakin tinggi, berpengaruh dalam memberikan arahan untuk menentukan sejauh mana perusahaan mengungkapkan informasi emisi karbon. Kebijakan pengungkapan emisi karbon dapat dipengaruhi oleh kepentingan manajemen yang bersifat oportunistik dengan memberikan informasi yang kurang sesuai. Fungsi monitoring dewan direksi dalam hal ini berperan sangat penting. Dewan direksi melaksanakan fungsi monitoring dengan memperhatikan bahwa perusahaan akan mendapatkan keuntungan jangka panjang dari pengungkapan emisi karbon, sehingga pencapaian transparansi tidak hanya sekedar dilaksanakan untuk menutupi manajemen laba (Nasih et al., 2019).

Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya dalam Prasetia & Marsono, (2015) dan Kusumawati & Nurharjanti (2019) yang menemukan bahwa dewan komisaris dapat menjalankan fungsi monitoring terhadap praktik manajemen laba, sehingga pengungkapan emisi karbon dilaksanakan secara sukarela. Pelaksanaan pengungkapan emisi karbon secara sukarela dilaksanakan tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan untuk mengalihkan perhatian para pemangku kepentingan dari manajemen laba.

5.3.3 Peran Moderasi Dewan Komisaris Independen pada Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Hasil pengujian regresi untuk hipotesis 3 menunjukkan ukuran dewan komisaris independen tidak mampu memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan emisi karbon. Hasil penelitian ini dapat dipengaruhi karena keberadaan dewan komisaris independen hanya dilakukan untuk memenuhi tuntutan regulasi, dan tidak bertujuan untuk meningkatkan *good corporate governance*. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa dewan komisaris independen melaksanakan fungsi pemantauan terhadap kinerja manajemen untuk mengungkapkan informasi kinerja keuangan dan non-keuangan yang relevan.

Hasil penelitian bertentangan dengan Machmuddah et al., (2017) yang menemukan bahwa semakin meningkatnya proporsi dewan komisaris independen akan meningkatkan fungsi pengawasan sehingga dapat memperlemah pengaruh positif manajemen laba terhadap pengungkapan emisi karbon. Sebaliknya, hasil penelitian ini sejalan dengan Hermiyetti &



Manik (2013) bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak menjalankan fungsi pengawasan, sehingga pemegang saham mayoritas memiliki peran yang lebih besar dalam mengontrol kegiatan perusahaan.

Keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaan sebenarnya berperan untuk meningkatkan fungsi pengawasan, karena anggota dewan tidak mempunyai hubungan dengan komisaris lainnya. Hasil temuan menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, belum dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam mempengaruhi manajemen laba dan pengungkapan emisi karbon. Dewan komisaris independen tidak dapat meningkatkan kualitas pengungkapan emisi karbon yang cukup kompleks dan memberikan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Hal ini dapat dipengaruhi oleh tingkat rata-rata dewan komisaris independen dalam perusahaan yang menjadi sampel penelitian, tidak sebanding dengan jumlah anggota dewan.

Komposisi komisaris independen yang relatif rendah menyebabkan kurangnya kekuatan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan dalam perusahaan (Nuryaman, 2008). Menurut Fama & Jensen (1983), peningkatan jumlah dewan komisaris independen akan memberikan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja manajemen secara maksimal untuk mematuhi standar dan hukum yang telah ditetapkan. Peningkatan jumlah dewan komisaris independen akan menghasilkan proses pemantauan secara lebih efektif untuk mengurangi manajemen laba (Busirin et al., 2015).

5.3.4 Peran Moderasi Kepemilikan Institusional pada Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan emisi karbon, dengan demikian H4 ditolak. Tidak adanya peran moderasi dikarenakan kepemilikan institusional tidak berperan secara efektif dalam menjalankan fungsi monitoring terhadap praktik manajemen laba dan pengungkapan emisi karbon. Fungsi monitoring yang kurang efektif dapat dipengaruhi oleh setiap peran yang berbeda dalam tipe kepemilikan institusional. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Zouari dan Rebai (2009), bahwa institusi yang tidak memiliki hubungan bisnis dengan manajemen seperti yayasan, cenderung memberi tekanan kepada manajemen untuk mengambil keputusan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sementara institusi yang memiliki hubungan bisnis seperti bank dan lembaga asuransi, tidak memainkan peran kontrol dalam kinerja manajemen untuk menghindari resiko yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional, dan isu kolusi dengan pimpinan.

Penelitian ini sejalan dengan Kusumaningtyas & Farida (2015) yang menunjukkan bahwa pemilik institusional cenderung berfokus pada laba jangka pendek, sehingga manajemen terpaksa untuk melakukan manipulasi laba. Akibatnya, manajemen menghadapi tuntutan untuk memenuhi target laba dari investor institusional sehingga akan terus terlibat dalam manipulasi laba (Cornett et al., 2006). Di sisi lain, kepemilikan institusional tidak dapat meningkatkan pengungkapan emisi karbon karena,

para pemilik institusional ingin memaksimalkan keuntungan diri sendiri (Halimah & Yanto, 2018).

Hasil penelitian ini bertentangan dengan temuan Akbas & Canikli (2018), bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang semakin tinggi, cenderung melaksanakan pengungkapan emisi karbon. Investor institusional ikut terlibat dalam memantau pilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen sehingga dapat mengurangi praktik manajemen laba (Ajay & Madhumati, 2015). Selain itu, hasil penelitian tidak mendukung teori agensi yang menjelaskan bahwa investor institusional berperan dalam mengurangi konflik kepentingan yang terjadi antara manajemen dengan pemegang saham. Konflik kepentingan akan terjadi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas karena pemegang saham mayoritas cenderung ingin memaksimalkan keuntungan diri sendiri dengan memanfaatkan informasi perusahaan yang tidak diketahui oleh pemegang saham minoritas (Halimah & Yanto, 2018).

5.3.5 Peran Moderasi *Audit Committee Meetings* pada Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Berdasarkan hasil penelitian, H5 menyatakan *audit committee meetings* tidak mampu memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan emisi karbon, sehingga hipotesis ditolak. Hasil penelitian yang bertentangan dengan hipotesis awal dapat dipengaruhi oleh adanya kemungkinan bahwa, komite audit melaksanakan rapat untuk membahas kepentingan perusahaan yang bersifat mendesak dibandingkan dengan melakukan pengawasan terhadap manajemen. Selain itu, temuan ini tidak



sejalan dengan teori agensi yang menyebutkan bahwa komite audit berperan dalam mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan.

Tingkat pertemuan komite audit yang semakin tinggi dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan fungsi monitoring. Namun, dalam penelitian ini penggunaan ukuran *audit committee meetings* belum cukup untuk mengurangi praktik manajemen laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan Choi et al., (2004); Leksono & Butar, (2018) yang menyebutkan bahwa *audit committee meetings* tidak dapat menemukan adanya kesalahan dalam praktik akuntansi oleh manajemen. *Audit committee meetings* tidak menjamin bahwa pelaksanaan fungsi monitoring terhadap pengungkapan lingkungan secara sukarela khususnya emisi karbon, telah dilakukan secara efektif.

Rata-rata pertemuan komite audit yang dilaksanakan sebanyak 7 kali dalam setahun, dinilai belum cukup untuk mengurangi manajemen laba dan meningkatkan kualitas pengungkapan emisi karbon. Hal ini bertentangan dengan Persons, (2009) yang menyebutkan bahwa perusahaan dengan tingkat pertemuan komite audit yang semakin tinggi, cenderung melaksanakan pengungkapan sukarela yang berkaitan dengan etika perusahaan seperti permasalahan lingkungan. Hasil temuan tidak sejalan dengan Sun et al., (2010) dan Chariri, (2018) yang menemukan bahwa pertemuan komite audit yang dilaksanakan setidaknya 5 kali dalam setahun dapat meningkatkan kualitas pengungkapan emisi karbon dan pelaporan keuangan secara lebih baik.



Kualitas dan kuantitas pelaporan keuangan dapat dicapai dalam pertemuan komite audit yang semakin tinggi, namun dengan memperhatikan pemahaman akan akuntansi secara mendalam pada setiap anggota. Keahlian dalam bidang akuntansi sangat penting untuk menangani kompleksitas laporan keuangan perusahaan dan mengurangi adanya *financial restatements* (Chandrasegaram et al., 2013). Oleh karena itu, *audit committee meetings* dan pengetahuan akan akuntansi secara mendalam pada setiap anggota komite perlu diperhatikan secara bersamaan dalam rangka mengurangi praktik manajemen laba, dan meningkatkan pengungkapan emisi karbon secara sukarela untuk mencapai *good corporate governance*.

5.4 Hasil Pengujian Variabel Kontrol

Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Hasil penelitian ini sejalan dengan Velayutham, (2014); Faisal et al., (2018) yang menyebutkan bahwa perusahaan dengan tingkat visibilitas dan sumber daya yang lebih besar memiliki intensif untuk mengatasi masalah lingkungan dan cenderung mengungkapkan informasi emisi karbon secara sukarela.

Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak selalu dapat menjadi pertimbangan dalam menilai pengungkapan emisi karbon perusahaan. Sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi tidak melakukan peningkatan pengungkapan informasi emisi karbon dengan



tujuan untuk menunjukkan keberhasilan kinerja keuangan (Pradini, 2013).

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Faisal et al., (2018) yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung mengungkapkan informasi emisi karbon.

Leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Perusahaan yang telah mendapatkan kepercayaan yang baik dari *debtholders* merasa tidak perlu untuk melakukan pengungkapan emisi karbon. Hasil ini bertentangan dengan Faisal et al., (2018) yang menyebutkan bahwa pengungkapan informasi emisi karbon dilakukan perusahaan untuk dapat meningkatkan kredibilitas dari *debtholders*.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan emisi karbon dengan mekanisme *corporate governance* sebagai variabel moderasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor industri dasar dan kimia, pertanian, energi, transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa adanya tindakan manajemen laba dalam perusahaan dapat meningkatkan pengungkapan informasi emisi karbon. Peningkatan pengungkapan emisi karbon digunakan untuk menimbulkan citra bahwa perusahaan memiliki etika yang baik dibalik adanya kepentingan pribadi manajemen. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris dapat meningkatkan kualitas pengungkapan emisi karbon yang tidak hanya digunakan sebagai bentuk simbolik untuk menutupi tindakan manajemen laba.

Dewan komisaris independen tidak dapat memperlemah hubungan antara manajemen laba dengan pengungkapan emisi karbon. Peran dewan komisaris independen dalam melaksanakan fungsi pemantauan tidak sebanding dengan pemegang saham mayoritas, yang memiliki kontrol lebih besar dalam memantau kegiatan manajemen. Selain itu, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa tingginya tingkat kepemilikan institusional, tidak dapat memperlemah hubungan antara manajemen laba terhadap



pengungkapan emisi karbon. Pemilik institusional tidak berperan secara efektif dalam menjalankan fungsi monitoring terhadap kinerja manajemen.

Hasil penelitian membuktikan bahwa *audit committee meetings* tidak dapat memperlemah hubungan manajemen laba dengan pengungkapan emisi karbon. Hal ini dikarenakan agenda rapat yang dilaksanakan oleh komite audit dilaksanakan untuk membahas masalah perusahaan yang bersifat mendesak. Pengawasan terhadap kinerja manajemen seperti indikasi terjadinya manajemen laba, dan pengungkapan emisi karbon kurang menjadi perhatian komite audit. Dengan demikian, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa pengungkapan emisi karbon dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengalihkan kewaspadaan para pemangku kepentingan terhadap adanya praktik manajemen laba dalam suatu perusahaan.

6.2 Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian baik secara teoritis, praktis, maupun kebijakan diuraikan pada sub-sub bab berikut.

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan dukungan pada aplikasi teori agensi dengan diterimanya hipotesis pertama, yaitu pengaruh positif manajemen laba terhadap pengungkapan emisi karbon. Temuan penelitian ikut mendukung teori stakeholder yang menyebutkan bahwa ketika asimetri informasi semakin tinggi, manajemen cenderung terlibat dalam manajemen laba untuk memenuhi tuntutan para pemangku kepentingan. Namun, hasil



penelitian ini bertentangan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berperan dalam melaksanakan fungsi pemantauan terhadap kinerja manajemen untuk mengungkapkan informasi kinerja keuangan dan non-keuangan yang relevan.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi perusahaan yang termasuk dalam sektor industri dasar dan kimia, pertanian, energi, transportasi bahwa tingginya tingkat pengungkapan emisi karbon dapat terkait dengan adanya manajemen laba. Bukti empiris yang didapatkan menunjukkan temuan bahwa mekanisme *corporate governance* seperti dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan *audit committee meetings* dinilai belum efektif dalam menjalankan fungsinya untuk memantau kinerja manajemen. Pihak perusahaan mungkin dapat meninjau kembali fungsi dari masing-masing aspek tata kelola perusahaan untuk mencapai penerapan *good corporate governance* secara efektif yang tentunya akan mempengaruhi kinerja manajemen. Selain itu, penerapan *good corporate governance* secara efektif oleh perusahaan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan emisi karbon.

3. Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik manajemen laba dari sisi oportunistik masih terjadi di Indonesia. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan oleh pemerintah sebagai regulator utama di Indonesia untuk



menetapkan undang-undang yang secara khusus mengatur standar akuntansi yang menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan berperan penting dalam pengambilan keputusan ekonomi dan memberikan pengaruh yang sangat luas dalam mendukung perekonomian nasional. Peningkatan transparansi dalam pengungkapan dan pelaporan keuangan dan non-keuangan tentunya sangat diharapkan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat menetapkan suatu landasan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat secara umum, khususnya investor dan kreditor.

6.3 Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini mempunyai keterbatasan jumlah sampel yang memenuhi kriteria hanya 12 dari 116 perusahaan yang terdaftar di BEI dikarenakan, informasi emisi karbon masih belum banyak diungkapkan. Nilai R^2 square pada penelitian ini masih tergolong rendah, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel moderasi dengan mekanisme *corporate governance* lain seperti kepemilikan manajerial. Penelitian Elyasih et al., (2018) menemukan bahwa kepemilikan manajerial dapat mengurangi perilaku oportunistik dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat memberikan bukti mengenai pengungkapan emisi karbon dengan manajemen laba di sektor usaha lainnya seperti manufaktur.



DAFTAR PUSTAKA

- Ade, F.W., Sudana, I. (2017). Industry profile dan corporate social responsibility expenditure. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(2): 1551-1578.
- Albersmann, B.T., Hohenfels, D. (2017). Audit committees and earnings management – evidence from the german two-tier board system. *Schmalenbach Business Review*, 18(2): 147-178.
- Aggarwal, R., Dow, S. (2011). Greenhouse gas emissions mitigation and firm value: a study of large north-American and European firms. *SSRN*.
- Ajay, R., Madhumati, R. (2015). Institutional ownership and earnings management in india. *Indian Journal of Corporate Governance*, 8(2): 119-136.
- Akbas, H.E., Canikli, S. (2018). Determinants of voluntary greenhouse gas emission disclosure: an empirical investigation on turkish firms. *Sustainability MDPI*, 11(1).
- Allegrini, M., Greco, G. (2013). Corporate boards, audit committees and voluntary disclosure: evidence from Italian Listed Companies. *Journal of Management Governance*, 17(1): 187-216.
- Al-Zyoud, A.A. (2012). The effects of chairman independence and ownership structure on earnings management. *World Applied Sciences Journal*, 17(8): 934-940.
- Alves, S. (2014). The effect of board independence on the earnings quality: evidence from portuguese listed companies. *Australasian Accounting Business and Finance Journal*, 8(3): 23-44.
- Anderson, C.R., Mansi, S.A., Reeb, D.M. (2004). Board characteristics, accounting report integrity, and the cost of debt. *Journal of Accounting and Economics*, 37(3): 315-342.
- Appuhami, R., Tashakor, S. (2017). The impact of audit committee characteristics on CSR disclosure: an analysis of australian firms. *Australian Accounting Review*, 27(4): 1-21.
- Aprilliani, R., Aloysius, H. (2017). Pengaruh ukuran dewan komisaris dan komite audit terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2013 – 2015. *PROFITA*, 10(3): 360-372.



Attig, N., Cleary, S., Ghoul, S.E., Guedhami, O. (2012). Institutional investment horizon and investment-cash flow sensitivity. *Journal of Banking & Finance*, 36(4): 1164-1180.

Bansal, S., Lopez-Perez, M.V., Rodriguez-Ariza, L. (2018). Board independence and corporate social responsibility disclosure: the mediating role of the presence of family ownership. *Administrative Sciences*, 8(3): 33-54.

Ben-Amar, W., Zeghal, D. (2011). Board of directors' independence and executive compensation disclosure transparency Canadian evidence. *Journal of Applied Accounting Research*, 12(1): 43-60.

Beneish, M.D. (2001). Earnings management: a perspective. *Managerial Finance*, 27(12):3-17.

Berthelot, S., Robert, A-M. (2011). Climate change disclosures: an examination of Canadian oil and gas firms. *Social & Environmental Accounting*, 5(1):106-123.

Blanco, C., Caro, F., Corbett, C.J. (2017). An inside perspective on carbon disclosure. *Business Horizons*, 60(5): 635-646.

Branco, M.E., Rodrigues, L.L. (2006). Corporate social responsibility and resource-based perspectives. *Journal of Business Ethics*, 69:111-132.

Brower, J., Mahajan, V. (2013). Driven to be good: a stakeholder theory perspective on the drivers of corporate social performance. *Journal of Business Ethics*, 117: 313-331.

Buertey, E., Sun, E., Lee, J.S., Hwang, J. (2019). Corporate social responsibility and earnings management: the moderating effect of corporate governance mechanisms. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 1-16.

Busirin, F.M., Azmi, N.A., Zakaria, N.B. (2015). How effective is board independence to the monitoring of earnings manipulation?. *Procedia Economics and Finance*, 31:462-469

Callery, P.J., Perkins, J. (2017). Unmasking symbolic management: evidence from voluntary corporate carbon disclosures. *University of California*.

Chandrasegaram, R., Rahimansa, M.R., Rahman, S.K.A., Suhaimi, A., & Mat K.N.M. (2013). Impact of Audit Committee Characteristics on Earnings Management in Malaysian Public Listed Companies. *International Journal of Finance and Accounting*, 2(2), 114-119.

- Chariri, A., Januarti, I., Yuyetta, E.N. (2018). Audit committee characteristics and carbon emission disclosure. *E3S Web of Conferences*.
- Chen, Y.C., Elder, R.J., Hsieh, Y-M. (2007). Corporate governance and earnings management: the implications of corporate governance best-practice principles for taiwanese listed companies. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 3(2):73-105.
- Choi, J., Jeon, K., Park, J. (2004). The role of audit committees in decreasing earnings management: korean evidence. *International Journal Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 1(1): 37-60.
- Choi, B.B., Lee, D., Psaros, J. (2013). An analysis of Australian company carbon emission disclosures. *Pacific Accounting Review*, 25(1): 58-79.
- Coburn, J., Donahue, S.H., Jayanti, S. (2011). Disclosing climate risks & opportunities in SEC filings. *CERES*.
- Cornett, M.M., Marcus, A.J., Saunders, A., Tehranian, H. (2006). Earnings management, corporate governance, and true financial performance. *SSRN*.
- Dechow, P.M., Sloan, R.G., Sweeney, A.P. (1996). Causes and consequences of earnings manipulation: an analysis of firms subject to enforcement actions by the SEC. *Contemporary Accounting Research*, 13(1): 1-36.
- Dechow, P.M., Dichev, I.D. (2002). The quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors. *The Accounting Review*, 77: 35-59.
- Depoers, F., Jeanjean, T., Jerome, T. (2014). Voluntary disclosure of greenhouse gas emissions: contrasting the carbon disclosure project and corporate reports. *Journal of Business Ethics*, 134(3). 445-461
- Donaldson, T., Preston, L.E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: concepts, evidence, and implications. *The Academy of Management Review*, 20(1): 65-91.
- Elyasih, J., Tang, Q., Len, Y-C. (2018). Corporate governance and carbon transparency: Australian experience. *Accounting Research Journal*, 31(3): 405-422.



Eisenhardt, K.M. (1989). Agency theory: an assessment and review. *The Academy of Management Review*, 14(1): 57-74.

Faisal, F., Tower, G., Rusmin, R. (2012). Legitimising corporate sustainability reporting throughout the world. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 6(2): 19-34.

Faisal, F., Andiningtyas, E.D., Achmad, T., Haryanto, H., Meiranto, W. (2018). The content and determinants of greenhouse gas emission disclosure: Evidence from Indonesian companies. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 1-10.

Fama, E.F., Jensen, M.C. (1983). Separation of ownership and control. *Journal of Law and Economics*, 26(2): 301-325.

FCGI. (2001). *Peranan dewan komisaris dan komite audit dalam pelaksanaan corporate governance (tata kelola perusahaan)*. Forum for Corporate Governance in Indonesia.

Fransiska, Y., Endang, R.A., Purwanto, N. (2016). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kebijakan dividen terhadap kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2012-2014. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama*, 4(1).

Freeman, R.E. et al. (2010). *Stakeholder theory-the state of the art*. United Kingdom: Cambridge University Press.

Forum for Corporate Governance in Indonesia. (2001). *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta.

Gavana, G., Gottardo, P., Maoisello, A.M. (2017). Earnings management and csr disclosure. family vs. non-family firms. *Sustainability MDPI*, 9(12): 1-21.

Ghomi, B., Leung, P. (2013). An empirical analysis of the determinants of greenhouse gas voluntary disclosure in australia. *Sciedu Press*, 2(1).

Ghozali, I., Chariri, A. (2007). *Teori akuntansi*. Semarang: UNDIP.

Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: UNDIP.

Gray, R., Kouhy, R., Lavers, S. (1995). Corporate social and environmental reporting. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 8(2): 47-77.



Grougiou, V., Leventis, S., Dedoulis, E., Owusu-Ansah, S. (2014). Corporate social responsibility and earnings management in U.S. banks. *Accounting Forum*, 38(3): 155-169.

Halimah, N.P., Yanto, H. (2018). Determinant of carbon emission disclosure at mining companies listed in indonesia stock exchange. *International Conference on Economics, Business and Economic Education 2018, KnE Social Sciences*: 127–141.

Haniffa, R.M., Cooke, T.E. (2002). Culture, corporate governance and disclosure in malaysian corporations. *A Journal of Accounting, Finance, and Business Studies ABACUS*, 38(3): 317-349.

Hemingway, C.A., MacLagan, P.W. (2014). Managers' personal values as drivers of corporate social responsibility. *Journal of Business Ethics*, 50(1): 33-44.

Hermiyetti, Manik, E.N. (2013). The influence of good corporate governance mechanism on earnings management: empirical study in indonesian stock exchange listed company for periods of 2006-2010, *Indonesian Capital Market Review*, 5(1): 52-63.

Hope, O.K., Thomas, W.B., Vyas, D. (2013). Financial reporting quality of u.s. private and public firms. *The Accounting Review*, 88(5): 1715-1742.

IICG. (2015). Corporate governance perception index, available at <http://www.iicg.org/agenda-iicg/21-corporate-governance-perception-index> (accessed February 10 2019).

Jensen, M.C., Meckling, W.H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4): 305-360.

Jo, H., Kim, Y. (2007). Disclosure frequency and earnings management. *Journal of Financial Economics*, 84(2).

Kasperit, T., Lopatta, K. (2018). Detecting Carbon Emission Disclosure Management. *SSRN*.

Kelvin, C., Daromes, F.E., Suwandi. (2017). Pengungkapan emisi karbon sebagai mekanisme peningkatan kinerja untuk menciptakan nilai perusahaan. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 6(1): 1-18.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2017). Laporan inventarisasi GRK.



Khan, H. (2011). A literature review of corporate governance. *International Conference on E-business, Management and Economics IPEDR*.

Kilic, M., Kuzey, C. (2018). The effect of corporate governance on carbon emission disclosures: evidence from turkey. *International Journal of Climate Change Strategies and Management*. 33(1):115-144.

Kim, Y., Park, M.S., Wier, B. (2012). Is earnings quality associated with corporate social responsibility?. *The Accounting Review*, 87(3): 761-796.

Klein, A. (2002). Audit committee, board of director characteristics, and earnings management. *Journal of Accounting and Economics*, 33: 375-400.

Kusumaningtyas, M., Farida, D.N. (2015). Pengaruh kompetensi komite audit, aktivitas komite audit dan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 4(1): 66-82.

Kusumawardhani, I. (2012). Pengaruh corporate governance, struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 9(1): 41-54.

Kusumawati, E., Nurharjanti, N.N. (2019). Manajemen laba, pengungkapan corporate social responsibility (csr) dengan corporate governance sebagai variabel moderasi. *The 9th University Research Colloquium*, 163-173.

Leksono, A.A., Butar, S.B. (2018). Pengaruh good corporate governance dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan corporate social responsibility. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(1): 1-18.

Liao, L., Luo, L., & Tang, Q. (2014). Gender diversity, board independence, environmental committee and greenhouse gas disclosure. *The British Accounting Review*, 47(4): 409-424.

Luo, L., Tang, Q., Lan, Yi-Chen. (2013). Comparison of propensity for carbon disclosure between developing and developed countries. *Accounting Research Journal*, 26(1): 6-34.

Machmuddah, Z., Syafruddin, M., Muid, D., Utomo, S.D. (2017). Manajemen laba, pengungkapan lingkungan perusahaan dan mekanisme tata kelola perusahaan. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 4(1): 55-72.



Mansor, N., Che-Ahmad, A., Ahmad-Zaluki, N.A., Osman, A.H. (2013). Corporate governance and earnings management: a study on the malaysian family and non-family owned PLCs. *Procedia Economics and Finance*, 7: 221-229.

Mardiana, I.B. (2017). Perbandingan model accrual dan model revenue dalam mendeteksi manajemen laba pada perusahaan manufaktur. Skripsi. *Universitas Negeri Semarang*.

Messier, W.F., Glover, S.M., Prawitt, D.F. (2008). *Auditing & assurance services: a systematic approach*. Sixth Edition. New York: The Mc Graw-Hill Companies, Inc.

Muryati, N., Suardhika, M. (2014). Pengaruh corporate governance pada nilai perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(2): 411-429.

Nainggolan, N.E., Rohman, A. (2015). Pengaruh struktur corporate governance terhadap pengungkapan lingkungan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(2): 1-9.

Nasih, M., Harymawan, I., Paramitasari, Y.I., Handayani, A. (2019). Carbon emissions, firm size, and corporate governance structure: evidence from the mining and agricultural industries in Indonesia. *Sustainability MDPI*, 11(9): 1-14.

Ndaparoka, D.S.R. (2012). Pengaruh mekanisme corporate governance terhadap nilai perusahaan dengan manajemen laba sebagai variabel pemoderasi. Tesis. *Universitas Brawijaya*.

Neu, D., Warsame, H., Pedwell, K. (1998). Managing public impressions: environmental disclosures in annual report. *Accounting, Organizations and Society*, 23(3): 265-282.

Neviana. (2010). Triple bottom line: lebih dari sekadar profit, available at <https://swa.co.id/swa/my-article/triple-bottom-line-lebih-dari-sekadar-profit> (accessed January 26 2019).

Nugroho, B.Y., Eko, U. (2011). Board characteristics and earnings management. *Journal of Administrative Science & Organization*, 18(1): 1-10.

Nuryaman (2008), Pengaruh konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan dan mekanisme corporate governance terhadap manajemen laba. *National Accounting Symposium XI*, Pontianak, Indonesia.

Obigbemi, I.F., Omolehinwa, E.O., Mukoro, D.O., Ben-Caleb, E., Olusanmi, O.A. (2016). Earnings management and board structure: evidence from Nigeria. *SAGE Open*, 6(3): 1-15.



Oktafia, Y. (2013). Pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan corporate governance sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika JINAH*, 2(2): 676-704.

Pahuja, S. (2009). Relationship between environmental disclosures and corporate characteristics: a study of large manufacturing companies in India. *Social Responsibility Journal*, 5(2): 227 – 244.

Panda, B., Leepsa, N.M. (2017). Agency theory: review of theory and evidence on problems and perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1): 74-95.

Parmar, B. L., et al. (2010). Stakeholder theory: the state of art. *The Academy of Management Annals*, 4(1):403-445.

Peasnell, K.V., Pope, P.F., Young, S. (2005). Board monitoring and earnings management: do outside directors influence abnormal accruals?. *Journal of Business Finance & Accounting*, 32(7): 1311-1346.

Persons, O.S. (2009). Audit committee characteristics and earlier voluntary ethics disclosure among fraud and no-fraud firms. *International Journal of Disclosure and Governance*, 6 (4): 284-297.

Prabowo, M.A. (2017). Tingkat keaktifan komite audit dan manajemen laba di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 17(2): 95-110.

Pradini, H.S., Kiswara, E. (2013). The analysis of information content towards greenhouse gas emissions disclosure in Indonesia's companies. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2): 1-12.

Pradnyani, I.A.A., Sisdyani, E.A. (2015). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan ukuran dewan komisaris pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11(2): 384-397.

Prasetya, D., Marsono. (2015). Analisis pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan corporate social responsibility dengan corporate governance sebagai variabel moderasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(1): 1-12.

Prior, D., Surroca, J., Tribo, J.A. (2008). Are socially responsible managers really ethical? exploring the relationship between earnings management and corporate social responsibility. *Corporate Governance: An International Review*, 16(3): 160-177.



Rahadian, A.H. (2009). Memahami konsep tata kelola perusahaan yang sehat (good corporate governance). *Jurnal Bijak STIAM*, 8(15): 75-90.

Rankin, M., Windsor, C., & Wahyuni, D. (2011), An investigation of voluntary corporate greenhouse gas emissions reporting in a market governance system: Australian evidence. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 24(8): 1037-1070.

Rupley, K.H., Brown, D., Marshall, R.S. (2012). Governance, media and the quality of environmental disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(6): 610-640.

Roberts, R.W. (1992). Determinants of corporate social responsibility disclosure: an application of stakeholder theory. *Accounting Organizations and Society*, 17(6): 595-612.

Saleh, N.M., Iskandar, T.M., Rahmat, M.M. (2007). Audit committee characteristics and earnings management: evidence from Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 15(2): 147-163.

Salewski, M., Zulch, H. (2014). The association between corporate social responsibility and earnings quality. *HHL Working Paper Series*.

Scott, W.R. (2015). *Financial Accounting Theory*. Seventh Edition. United State of America: Pearson.

Sebayang, H.B., Veronica, S. (2014). Analisis perbandingan model pengukuran manajemen laba. *Universitas Indonesia*.

Sekaran, U., Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business*. Edisi Ketujuh. United Kingdom: John Wiley & Sons.

Sembing, C.L. (2017). Manajemen Laba dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan Komisaris Independendan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Pemoderasi. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(1): 20-41.

Soliman, M.M., Ragab, A.A. (2014). Audit committee effectiveness, audit quality and earnings management: an empirical study of the listed companies in egypt. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(2): 155-166.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta



Sun, N., Salama, A., Hussainey, K., & Habbash, M. (2010). Corporate environmental disclosure, corporate governance and earnings management. *Managerial Auditing Journal*, 25(7): 679-700.

Sutaryo., Payamta., Bandi. (2011). Penentu frekuensi rapat komite audit: bukti pelaksanaan good corporate governance di Indonesia. *Universitas Sebelas Maret*.

Stubben, S.R. (2010). Discretionary Revenues as a Measure of Earnings Management. *The Accounting Review*, 85(2): 695-717.

Suyono, E. (2018). Peran komite audit dalam meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan: bukti empiris di bursa efek negara-negara teluk. *Jurnal Visioner, & Strategies*, 7(1): 7-16.

Tariverdi, Y., Moradzadehfard, M., Rostami, M. (2012). The effect of earnings management on the quality of financial reporting. *African Journal of Business Management*, 6(12): 4603-4611.

The Indonesian Institute for Corporate Governance. (2015). *Corporate Governance Perception Index 2014*.

Triatmodjo, M. (2005). Implikasi berlakunya protokol Kyoto – 1997 terhadap Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 2(2): 294-310.

Ujiyantho, M.A., Pramuka, B.A. (2007). Mekanisme corporate governance, manajemen laba dan kinerja keuangan. *National Accounting Symposium X*, Makassar, Indonesia.

UNFCCC. (1998). Kyoto Protocol. *Japan*.

Velayutham, E. (2014). Voluntary disclosure of greenhouse gas emissions, corporate governance and earnings management: Australian evidence. Tesis. *University of Southern Quennsland*.

Verrecchia, R.E. (2001). Essays on disclosure. *Journal of Accounting and Economics*, 32(1-3): 97-180.

Wood, D., Ross, D.G. (2006). Environmental social controls and capital investments: Australian evidence. *Accounting and Finance*, 46: 677-695.

World Resources Institute. (2015). A global look at mandatory greenhouse gas reporting programs, available at: <http://www.wri.org/blog/2015/05/global-look-mandatory-greenhouse-gas-reporting-programs> (accessed January 26 2019).



Young, S. (2015). Earnings management and corporate governance. *Wiley Encyclopedia of Management*.

Yunus, S., Elijido-Ten, E., Abhayawansa, S. (2016). Determinants of carbon management strategy adoption. *Managerial Auditing Journal*, 31(2): 156 – 179.

Zahra, S.A., Priem, R.L., Rasheed, A.A. (2005). The antecedents and consequences of top management fraud. *Journal of Management*, 31(6): 803-828.

Zhou, Z., Zhou, H., Peng, D., Chen, X., Li, S. (2018): Carbon disclosure, financial transparency, and agency cost : evidence from chinese manufacturing listed companies. *Emerging Markets Finance and Trade*, 54(12): 2669-2686.

Zouari, A., Rebai, I. (2009). Institutional ownership differences and earnings management: a neural networks approach. *International Research Journal of Finance and Economics*. 34: 42-55.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Sampel Penelitian

No	Kode	Nama Perusahaan
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.
2	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk.
3	SGRO	Sampoerna Agro Tbk.
4	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
5	AMFG	Ashashimas Flat Glass Tbk.
6	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.
7	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
8	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.
9	ARNA	Arwana Citramulia Tbk.
10	SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk.
11	BIRD	Blue Bird Tbk.
12	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk.

Lampiran 2. Tabulasi Pengungkapan Emisi Karbon 2014

No	Kode	Nama Perusahaan	CC-1	CC-2	GHG-1	GHG-2	GHG-3	GHG-4	GHG-5	GHG-6	GHG-7	EC-1	EC-2	EC-3	RC-1	RC-2	RC-3	RC-4	ACC-1	ACC-2	CED
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	1		1		1							1	1				1		6
2	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk.	1																1		2
3	SGRO	Sampoerna Agro Tbk.	1												1				1	1	4
4	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.	1																		1
5	AMFG	Ashashimas Flat Glass Tbk.													1				1		2
6	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.			1		1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	12
7	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.													1						1
8	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.										1			1				1	1	4
9	ARNA	Arwana Citramulia Tbk.													1						1
10	SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk.													1						1
11	BIRD	Blue Bird Tbk.													1						1
12	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk.	1												1						2

Lampiran 3. Tabulasi Pengungkapan Emisi Karbon 2015

No	Kode	Nama Perusahaan	CC-1	CC-2	GHG-1	GHG-2	GHG-3	GHG-4	GHG-5	GHG-6	GHG-7	EC-1	EC-2	EC-3	RC-1	RC-2	RC-3	RC-4	ACC-1	ACC-2	CED
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	1		1		1							1	1				1	1	7
2	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk.	1												1						2
3	SGRO	Sampoerna Agro Tbk.	1	1											1				1		4
4	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.	1																		1
5	AMFG	Ashashimas Flat Glass Tbk.													1				1		2
6	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	1	14
7	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.						1							1						2
8	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	1		1		1	1			1	1			1	1	1		1	1	11
9	ARNA	Arwana Citramulia Tbk.										1		1	1		1				4
10	SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk.										1		1	1		1				4
11	BIRD	Blue Bird Tbk.													1						1
12	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk.	1												1						2



Lampiran 4. Tabulasi Pengungkapan Emisi Karbon 2016

No	Kode	Nama Perusahaan	CC-1	CC-2	GHG-1	GHG-2	GHG-3	GHG-4	GHG-5	GHG-6	GHG-7	EC-1	EC-2	EC-3	RC-1	RC-2	RC-3	RC-4	ACC-1	ACC-2	CED
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	1		1	1	1								1	1			1	1	8
2	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk.			1										1						2
3	SGRO	Sampoerna Agro Tbk.	1	1	1								1		1				1		6
4	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.	1									1	1								3
5	AMFG	Ashashimas Flat Glass Tbk.													1				1		2
6	INTP	Indocement Tungal Prakarsa Tbk.	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	15
7	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.						1							1						2
8	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	1	1	1		1	1		1		1	1	1	1		1		1	1	14
9	ARNA	Arwana Citramulia Tbk.	1												1						2
10	SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk.	1												1						2
11	BIRD	Blue Bird Tbk													1						1
12	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk.	1												1						2

Lampiran 5. Tabulasi Pengungkapan Emisi Karbon 2017

No	Kode	Nama Perusahaan	CC-1	CC-2	GHG-1	GHG-2	GHG-3	GHG-4	GHG-5	GHG-6	GHG-7	EC-1	EC-2	EC-3	RC-1	RC-2	RC-3	RC-4	ACC-1	ACC-2	CED
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	1		1	1	1								1	1			1		7
2	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk.	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1						11
3	SGRO	Sampoerna Agro Tbk.	1		1		1							1	1		1		1	1	8
4	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.	1										1	1	1	1			1		6
5	AMFG	Ashashimas Flat Glass Tbk.													1				1		2
6	INTP	Indocement Tungal Prakarsa Tbk.	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1			1	1	14
7	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.					1	1				1	1	1	1						6
8	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	1		1		1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	13
9	ARNA	Arwana Citramulia Tbk.	1												1						2
10	SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk.	1												1						2
11	BIRD	Blue Bird Tbk													1						1
12	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk.	1												1						2

Lampiran 6. Tabulasi Pengungkapan Emisi Karbon 2018

No	Kode	Nama Perusahaan	CC-1	CC-2	GHG-1	GHG-2	GHG-3	GHG-4	GHG-5	GHG-6	GHG-7	EC-1	EC-2	EC-3	RC-1	RC-2	RC-3	RC-4	ACC-1	ACC-2	CED
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	1		1										1				1	1	5
2	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk.	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1						11
3	SGRO	Sampoerna Agro Tbk.	1	1	1							1	1		1		1		1	1	9
4	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.					1					1	1	1	1				1		6
5	AMFG	Ashashimas Flat Glass Tbk.			1										1				1		3
6	INTP	Indocement Tungal Prakarsa Tbk.	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1			1	1	14
7	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	1		1		1	1				1	1	1	1						8
8	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	1		1		1	1		1	1	1	1	1	1				1	1	12
9	ARNA	Arwana Citramulia Tbk.	1												1						2
10	SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk.	1												1						2
11	BIRD	Blue Bird Tbk													1						1
12	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk.	1												1						2

Lampiran 7. Perhitungan Manajemen Laba (*Conditional Revenue Model*)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.857	10.784		1.934	.059
	ΔR_{it}	-18.954	10.625	-4.265	-1.784	.080
	$\Delta R_{it} \times SIZE_{it}$	.649	.509	2.278	1.276	.208
	$\Delta R_{it} \times AGE_SQ_{it}$	-1.014	.524	-2.966	-1.936	.058
	$\Delta R_{it} \times GRR_P_{it}$	-5.523	2.126	-2.871	-2.598	.012
	$\Delta R_{it} \times GRR_N_{it}$	-14.800	10.998	-1.288	-1.346	.184
	$\Delta R_{it} \times GRM_{it}$	2.494	3.678	.883	.678	.501
	$\Delta R_{it} \times GRM_SQ_{it}$	.188	.622	.236	.302	.764
	$\Delta R_{it} \times AGE_{it}$	-15.165	7.866	-5.869	-1.928	.059

a. Dependent Variable: ΔR_{it}

Lampiran 8. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CED	60	1	15	5.00	4.310
EM	60	-76.9053	15.4453	-24.498635	10.9527716
COMMSIZE	60	2	8	5.27	1.676
COMMIND	60	.2000	.6667	.406151	.1013121
INSOWN	60	.1397	.9901	.671397	.2180507
AUDIT	60	2	15	7.57	3.670
SIZE	60	14.0460	17.7504	15.969127	.9837512
ROA	60	.0008	.2078	.079948	.0462595
LEV	60	.0715	.6637	.352925	.1533124
Valid N (listwise)	60				

Lampiran 9. Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov Smirnov) Model 1

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.85056419
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.075
	Negative	-.091
Test Statistic		.091
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.



Lampiran 10. Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov Smirnov) Model 2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.66272479
Most Extreme Differences	Absolute	.095
	Positive	.054
	Negative	-.095
Test Statistic		.095
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran 11. Hasil Uji Multikolinearitas Model 1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-4.657	3.175		-1.467	.148		
	EM	.085	.034	.290	2.462	.017	.913	1.095
	SIZE	1.340	.343	.465	3.903	.000	.891	1.122
	ROA	4.161	9.765	.058	.426	.672	.679	1.474
	LEV	-3.298	2.777	-.153	-1.188	.240	.764	1.309

a. Dependent Variable: CED

Lampiran 12. Hasil Uji Multikolinearitas Model 2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-10.325	4.715		-2.190	.034		
	EM	.298	.081	1.021	3.688	.001	.143	6.992
	COMMSIZE	-1.061	.499	-.571	-2.125	.039	.152	6.582
	COMMIND	1.331	5.124	.046	.260	.796	.355	2.819
	INSOWN	-1.689	3.766	-.111	-.448	.656	.178	5.620
	AUDIT	.137	.235	.157	.584	.562	.153	6.551
	EM*COMMSIZE	-.041	.013	-1.029	-3.159	.003	.103	9.682
	EM*COMMIND	-3.613	13.002	-.081	-.278	.782	.128	7.815
	EM*INSOWN	4.200	16.767	.080	.250	.803	.109	9.193
	EM*AUDIT	-132.624	214.402	-.190	-.619	.539	.116	8.599
	SIZE	2.623	.597	.910	4.393	.000	.255	3.916
	ROA	6.817	10.253	.095	.665	.509	.533	1.875
	LEV	-3.565	3.196	-.165	-1.115	.270	.500	2.001

a. Dependent Variable: CED

Lampiran 13. Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson Model 1

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.552 ^a	.304	.254	2.85804	1.742

a. Predictors: (Constant), LEV, SIZE, EM, ROA

b. Dependent Variable: CED



Lampiran 14. Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson Model 2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.696 ^a	.485	.353	2.66066	1.854

a. Predictors: (Constant), LEV, EM*INSOWN, SIZE, EM, AUDIT, COMMIND, ROA, INSOWN, COMMSIZE, EM*COMMIND, EM*AUDIT, EM*COMMSIZE

b. Dependent Variable: CED

Lampiran 15. Hasil Analisis Regresi Tanpa Moderasi

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LEV, SIZE, EM, ROA ^b		Enter

a. Dependent Variable: CED

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.552 ^a	.304	.254	2.85804

a. Predictors: (Constant), LEV, SIZE, EM, ROA

b. Dependent Variable: CED

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	196.528	4	49.132	6.015	.000 ^b
	Residual	449.261	55	8.168		
	Total	645.788	59			

a. Dependent Variable: CED

b. Predictors: (Constant), LEV, SIZE, EM, ROA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4.657	3.175		-1.467	.148
	EM	.085	.034	.290	2.462	.017
	SIZE	1.340	.343	.465	3.903	.000
	ROA	4.161	9.765	.058	.426	.672
	LEV	-3.298	2.777	-.153	-1.188	.240

a. Dependent Variable: CED

Lampiran 16. Hasil Analisis Regresi Moderasi

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LEV, EM*INSOWN, SIZE, EM, AUDIT, COMMIND, ROA, INSOWN, COMMSIZE, EM*COMMIND, EM*AUDIT, EM*COMMSIZE ^b		Enter

a. Dependent Variable: CED

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.696 ^a	.485	.353	2.66066

a. Predictors: (Constant), LEV, EM*INSOWN, SIZE, EM, AUDIT, COMMIND, ROA, INSOWN, COMMSIZE, EM*COMMIND, EM*AUDIT, EM*COMMSIZE

b. Dependent Variable: CED

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	313.071	12	26.089	3.685	.001 ^b
	Residual	332.718	47	7.079		
	Total	645.788	59			

a. Dependent Variable: CED

b. Predictors: (Constant), LEV, EM*INSOWN, SIZE, EM, AUDIT, COMMIND, ROA, INSOWN, COMMSIZE, EM*COMMIND, EM*AUDIT, EM*COMMSIZE

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-10.325	4.715		-2.190	.034
	EM	.298	.081	1.021	3.688	.001
	COMMSIZE	-1.061	.499	-.571	-2.125	.039
	COMMIND	1.331	5.124	.046	.260	.796
	INSOWN	-1.689	3.766	-.111	-.448	.656
	AUDIT	.137	.235	.157	.584	.562
	EM*COMMSIZE	-.041	.013	-1.029	-3.159	.003
	EM*COMMIND	-3.613	13.002	-.081	-.278	.782
	EM*INSOWN	4.200	16.767	.080	.250	.803
	EM*AUDIT	-132.624	214.402	-.190	-.619	.539
	SIZE	2.623	.597	.910	4.393	.000
	ROA	6.817	10.253	.095	.665	.509
	LEV	-3.565	3.196	-.165	-1.115	.270

a. Dependent Variable: CED